Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si.

MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN

Hasil Penelitian Seri Kedua





EDISI REVISI




YAYASAN SYECH WALID THAIB SALEH INDRAGIRI
اهل السنة والجماعة
TEMBILAHAN - INHIL - RIAU

MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN

Hasil Penelitian Seri Kedua

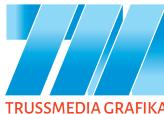
EDISI REVISI

MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN

Hasil Penelitian Seri Kedua

EDISI REVISI

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN;
Hasil Penelitian Seri Kedua

I. Manajemen II. Pembangunan III. Teks

MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN

Hasil Penelitian Seri Kedua

EDISI REVISI

Penulis:
Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si.

Editor/ Penyunting:
Minan Nuri Rohman

Penyelaras Akhir:
M. Aqibun Najih

Cover & Layout:
st. Navisah

Penerbit:
Trussmedia Grafika
Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 081 903 717 727/ 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com
www.trussmediagrafika.com

Cetakan Edisi Revisi, Maret 2016
x + 151; 14 x 20,5 cm
ISBN: 978-602-0992-54-9

KATA PENGANTAR

Setiap kali penulis menyampaikan materi perkuliahan maupun pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya, penulis seringkali merasa tersentak dan prihatin terhadap realitas yang terjadi dalam masyarakat dalam kaitannya dengan implementasi pemanfaatan manajemen strategis dalam menjawab tantangan pembangunan.

Sebagai bentuk tanggungjawab intelektual, penulis terketuk hati untuk *sharing* pengalaman dalam sebuah buku berjudul: *Manajemen Strategis dalam Pembangunan; Hasil Penelitian Seri Kedua".* Buku sederhana ini merupakan hasil penelitian ilmiah yang telah penulis lakukan sebagai kerangka konstruktif yang ideal terhadap dinamika masalah yang *urgent* terhadap tahapan tipikal pembangunan.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan akan penulis kupas secara mendalam dan komprehensif. Pembahasan dalam buku ini terdiri dari tujuh (7) bab, yaitu: Bab I; Penerapan Manajemen Strategi Dalam Organisasi Publik Dan Non Profit, Bab II; Manajemen Strategi Sumber-Sumber Daya Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bab III;

Pembangunan Masyarakat Perdesaan, Bab IV; Analisis Potensi Alam Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pembangunan Pertanian Terpadu Di Pedesaan, Bab V; Perencanaan Strategis Dan Terpinggirnya Masyarakat Setempat Dalam Proses Pembangunan di Riau, Bab VI; Transparansi Pembangunan; Suatu Upaya Terciptanya Pemerataan Pembangunan Dan Rasa Keadilan Di Masyarakat, Bab VII; Ekonomi Rakyat.

Kehadiran buku ini semoga memberi banyak informasi dan pengetahuan terkait pemanfaatan pola manajemen strategis yang nantinya mampu memberi akses positif. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyajian materi buku ini terdapat kekhilafan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan materi buku ini di kemudian hari.

Kepada Allah SWT secara khusus penulis mengharapkan rahmat dan petunjuk-Nya, semoga penulis senantiasa lebih produktif dalam berkarya. Niat baik penulis ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dan menjadi *amal shalih,* baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat pada umumnya, Amin.

Pekanbaru, Maret 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

BAB II

MANAJEMEN STRATEGIS SUMBER-SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

BAB III

PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

BAB IV

ANALISIS POTENSI ALAM SEBAGAI LANDASAN PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN TERPADU DI PEDESAAN

BAB I

PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIS DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN NON PROFIT

A. Pendahuluan

Apabila konsep, model dan proses manajemen strategis dihubungkan dengan sistem yang hidup (Emile Durkheim dan Talcott Parson) serta teori manajemen ilmiah (Taylor) dan teori prinsip yang umum manajemen dan unsur-unsur manajemen sebagai fungsi manajemen (Fayol). Dapat dipahami setidak-tidaknya ada tiga hal penting yang sangat menonjol sebagai karakteristik dari manajemen strategis. Ketiga karakteristik itulah sebagai landasan yang membangun konsep, model, teori dan proses manajemen strategis yaitu :

1. Landasan utama bangunan teori manajemen strategis bersumber dari teori sistem yang hidup *(Grand Theory)* dari Emile Durkheim dan Talcott Parsons yang kemudian berkembang menjadi teori sistem terbuka (*input*, proses, *output*, dan *feedback* dari lingkungan).
2. Empat elemen dasar proses manajemen strategis (strategis analisis lingkungan dengan analisis SWOT, strategis formulasi, strategis implementasi, dan

strategis eveluasi dan kontrol) dibangun dari teori Aksi (*Action Theory*) Max Weber dan Talcott Parson yang dirangkai dalam satu model, dibentuk dari prinsip yang yang umum dan unsur-unsur manajemen sebagai fungsi manajemen yang dikemukakan Taylor (manajemen ilmiah) dan Fayol (prinsip yang umum manajemen dan fungsi manajemen).

Pada organisasi bisnis, pengkajian dan penerapan manajemen strategis telah berlangsung lama dan berkembang dengan pesat, namun tidaklah demikian untuk organisasi publik dan organisasi non profit (nirlaba), penerapan dan perkembangan manajemen strategis terlihat masih sangat lambat dan belum begitu populer. Keadaan demikian dapat dipahami karena kemajuan pengembangan ilmu administrasi bisnis jauh lebih pesat perkembangannya terutama akibat pengaruh perkembangan ilmu ekonomi. Sedangkan ilmu administrasi publik sedikit terhambat, dikarenakan begitu kuatnya pengaruh faktor ilmu politik, dan mungkin itulah salah satu ciri dalam disiplin ilmu administrasi negara, mengingat pula lahirnya disiplin ilmu administrasi negara tidak terlepas dari pengaruh pakar ilmu politik Amerika Serikat, meskipun pada perkembangannya yang terakhir telah dinyatakan bahwa paradigma terakhir ilmu administrasi negara adalah ilmu administrasi negara (Hendry, 1988 : 34).

Hunger dan Wheelen (1996) telah membahas tentang manajemen strategis dalam karyanya yang berjudul *"Strategic Management"*, yang menjelaskan bahwa penerapan manajemen strategis di perusahaan yang berorientasi bahwa penerapan manajemen strategis di perusahaan yang berorientasi laba dimaksudkan untuk memehami kekuatan

bersaing yang mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Proses manajemen strategis membantu organisasi mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Konsep-konsep strategis selalu memberi perhatians erius terhadap perumusan tujuan dan sasaran organisasi, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, serta peluang-peluang dan tantangan yang senantiasa dihadapi oleh setiap organisasi dengan pendekatan analisis SWOT. Hunger dan Wheelen (1996: 7) menyatakan *The process of strategic management involves four basic element: (1) environmental scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4) evaluation and control.*

Meskipun manajemen strategis telah berkembang luas dan sangat efektif penerapannya di organisasi bisnis, namun bagaimana efektivitas penerapannya pada organisasi publik dan organisasi non profit, masih ada pro dan kontra. Atas dasar pertanyaan itu, tulisan ini berusaha menjawab permasalahan.

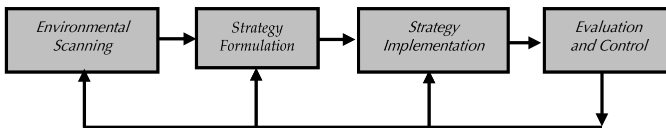
B. Konsep, Proses dan Model Manajemen Strategis

Hunger dan Wheelen (1996) mengemukakan manajemen strategis didefenisikan sebagai "*that set of managerial decisions and actions that determines the long run performance of a corporation. It include enviromental scanning, strategy formulation (strategic or long-ranger planning), strategy implementation, and evaluation and control*".

Kemudian ia mengemukakan bahwa suatu proses dari manajemen strategis melibatkan empat elemen dasar

yang saling berhubungan : (1) environmental scanning, (2) *strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4) evaluation and control.* Proses manajemen strategis tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Proses Manajemen Strategis dari Hunger dan Wheelen

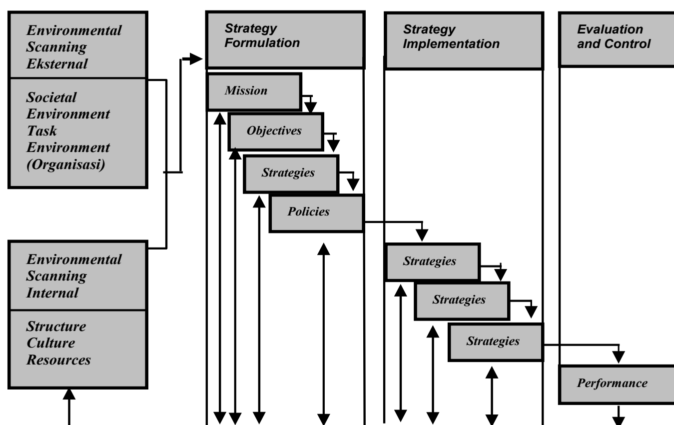


Sumber: *Hunger dan Wheelen (1996)*

Dalam setiap organisasi *(corporate)*, proses manajemen strategis meliputi aktivitas yang berlangsung terus menerus dengan pola aktivitas bersifat siklus, dari kegiatan analisis lingkungan sampai kepada kegiatan mengevaluasi dan mengawasi. Kelompok manajemen strategis menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi). Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dankelemahannya, serta peluang-peluang dan tantangan yang senantias dihadapi oleh setiap organisasi dianalisis dengan pendekatan analisis SWOT. Setelah faktor-faktor strategis diidentifikasi, kelompok manajemenm strategis mengevaluasi hubungan dan menentukan misi organisasi. Tahap pertama, formulasi strategis adalah suatu pernyataan dari misi, tujuan-tujuan, strategis-strategis, dan kebijakan-kebijakan organisasi. Implemetnasi strategis organisasi merupakan proses program-

program, anggaran-anggaran, dan prosedur-prosedur. Terakhir, evaluasi dankontrol kegiatan sebagai umpan balik aktivitas organisasi. Suatu model manajemen strategis sebagai suatu proses yang terus menerus dapat diilustrasikan pada gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2.
Model Manajemen Strategiss dari Hunger dan Wheelen



Sumber: *Modifikasi Hunger dan Wheelen (1996:11)*

C. Dasar Penerapan Manajemen Strategis Dalam Organiosasi Publik dan Organisasi Nonprofit

1. Alasan Filosofis

Ditemukan dan berkembangnya ilmu pengetahuan, tidak dapat dipungkiri sebagai suatu kodrat yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia berupa rasa keingintahuan terhadap gejala alam semesta. Berawal dari kegiatan berfilsafat

seperti yang telah dilakukan filosuf-filosuf pada zaman Yunani Kuno yang terkenal, Plato, Zenus dan Aristoteles. Mereka ingin tahu hakekat dari kebenaran yang sebenarnya dari gejala atau fenomena alam dan sosial.

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terpilih telah diperintahkan Allah SWT untuk menulis dan membaca, dengan diturunkannya ayat Iqra' dalam surat Al-Baqarah. Perintah ini berlaku untuk seluruh ummat manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadits yang shahih bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat (seumur hidup), kemudian Allah SWT menjanjikan pahala yang tidak pernah putusnya kepada mereka yang memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain.

Dari uraian singkat tersebut di atas memberikan makna bahwa ilmu pengetahuan dapat menjelaskan dan memprediksikan segala yanbg ada di alam semesta.

Dengan demikian secara filosofis dapat saja suatu pendekatan dalam manajemen bisnis dalam hal ini manajemen strategis diterapkan ke dalam administrasi dan manajemen publik dan nonprofit, dengan dasar pemikiran bahwa apakah manajemen bisnis maupun manajemen publik sama-sama beridukkan kepada ilmu adminitsrasi yang memiliki asas organisasi, prinsip yang umum manajemen, prinsip manajemen ilmiah dan unsur-unsur manajemen sebagai fungsi manajemen yang sama dalam mencapai tujuan, hanya saja sedikit berbeda di dalam tahap implementasi dan tujuan yang ingin dicapai (Taylor, 1911 : *The Principles of Scientific Management;* Fayol, 1961 : *Administration Industrielle et Generale).*

2. Alasan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Manajemen

Ilmu Administrasi Niaga (*Business Administration*) dan Administrasi Negara (*Public Administration* berakar dan berinduk dari Ulmi Administrasi. White (Shafritz dan Hyde, 1987 : 60) mengemukakan arti atau defenisi administrasi dalam arti yang luas, *Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or miltary, large scale or small scale …etc)*.

Ditemukan dan berkembangnya ilmu administrasi dan manajemen bisnis ataupun ilmu administrasi dan manajemen publik tidak terlepas dari pengaruh temuan-temuan dari Frederick Winslow Taylor yang diterbitkan dalam karyanya yang terkenal berjudul *The Principles of Scientific Management (1911*).

Demikian pula sumbangsih dari Henri Fayol sebagai Bapak dalam teori manajemen modern, terhadap penemuan dan perkembangan ilmu administrasi. Karyanya yang terkenal dengan judul: *Administration Indrustrielle et Generale (1916)*.

Dalam seluruh risalah Fayol, ada suatu pengertian mengenai keuniversalan prinsip danunsur atau fungsi manajemen. Berkali-kali dia menunjukkan bahwa hak itu tidak hanya cocok bagi perusahaan saja (organisasi bisnis), tetapi juga bagi kegiatan-kegiatan seperti politik, keagamaan, panti asuhan, kemiliteran, dan lain-lain. Karena semua usaha memerlukan manajemen, maka formula suatu teori manajemen adalah penting untuk diajarkan secara efektif.

Dengan demikian penerapan asas, prinsip yang umum dan unsur atau fungso-fungsi manajemen, berlaku sama kepada semua organisasi, baik organisasi bisnis maupun

organisasi publik. Hanya saja situasi kondisi lingkungan baik internal dan eksternal yang dihadapi setiap organisasi tentunya berbeda-beda. Demikian pula tujuan yang ingin dicapai setiap organisasi juga berbeda-beda. Organisasi bisnis lebih mengarah kepada *profit making*, sedangkan organisasi publik lebih memberi penekanan kepada aspek-aspek pelayanan, meskipun akibat dari pelayanan yang bermutu belum tentu mendatangkan hasil (keuntungan) buat organisasi publik. Sebenarnya kedua model organisasi ini, baik organisasi bisnis, publik, maupun organisasi nonprofit (sektor ketiga) sama-sama mengutamakan fungsi pelayanan. Lebih lagi akhir-akhir ini birokrasi pemerintah semakin disorot kinerjanya, sebagaimana telah dikemukakan David Osborne dan Tes Gaebler (1992) bahwa perlu mengarahkan atau mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik (mewirausahakan birokrasi), karena cara-cara dan mekanisme kerja birokrasi pemerintah akhir-akhir ini ternyata kurang rasional bila dibandingkan dengan cara dan mekanisme kerja organisasi bisnis.

Uraian pada bagian ini, berusaha memberi gambaran bahwa dilihat dari sudut pandang ilmu administrasi dan manajemen sebenarnya organisasi publik, organisasi non profit dan organisasi bisnis di dalam menjalankan aktivitasnya memiliki landasan yang tidak terlalu jauh berbeda. Selain dari organisasi publik, organisasi nonprofit dan organisasi bisnis sama-sama memiliki persamaan asas, prinsip umum dan unsur manajemen sebagaimana dikemukakan Tayor dan Fayol.

Hanya saja dalam menerapkan manajemen strategis ke dalam organisasi publik dan organisasi non profit ada

beberapa hal yang perlu mendapat penekanan karena dianggap sedikit berbeda, yang dibagi kepada 2 kelompok bagian yaitu :

1. Perbedaan pada tahap analisis lingkungan (*analysis environment*) antara organisasi publik, organisasi nonprofit dan organisasi bisnis. Ini dikarenakan bentuk dan sifat dari lingungan yang dihadapi masing-masing organisasi ada perbedaan, sangat tergantung pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi setiap organisasi baik organisasi publik, organisasi nonprofit ataupun organisasi bisnis, dalam hal: kekuasaan dan politik, pengaruh pemimpin publik, loyalitas dan efisiensi, sumber dana dan profesionalisme, tingkat hubungan dengan pasar, kendala formalitas dan hukum, dampak yang luas, pengamatan terhadap publik, harapan publik yang unik, kompleksitas organisasi, hubungan otoritas dan peran, penampilan operasional, insentif dan struktur insentif, karakteristik pegawai atau karyawan. Selain itu tergantung pula pada misi, tujuan, sasaran dan program kerja masing-masing organisasi. Disinilah letak keunggulan efektivitas dari manajemen strategis,karena selalu mampu melakukan penyesuaian dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.
2. Perbedaan pada aspek tujuan organisasi. Meskipin sama-sama mengutamakn pelayanan, namun untuk organisasi bisnis yang menjadi ukuran selalu untung danrugi, sedangkan pada organisasi publik dan organisasi nonprofit kualitas pelayanan yang

diberikan tidak menjadi keharusan diukur dengan untung atau rugi bagi organisasi.

Perbedaan analisis lingkungan dan tujuan organisasi, membuat penekanan dalam penerapan manajemen strategis untuk organisasi bisnis, organisasi publik dan organisasi nonprofit tentunya berbeda-beda pula, yang terpenting adalah bagaimana semua unsur-unsur dan persyaratan dari manajemen strategis dapat dipenuhi.

3. Alasan Teoritis

Setelah mempelajari dan menahami konsep, model dan proses manajemen strategis dari beberapa literatur (misalnya yang dikemukakan : Pearce II dan Robinson, 1997 ; Hitt, Ireland dan Hoskosson, 1997 ; Hunger dan Wheelen, 1996 ; Campbell dan Fainstein, 1996 ; Mintberg, 1994 ; Schoderbek dan Kefalas, 1985 ; Steiner, 1969; Salusu, 1996; dan Rangkuti, 1997).

Dari konsep, model dan proses manajemen strategis sebagaimana dikemukakan dalam berbagai literatur tersebut di atas, tampak dengan jelas salah satu yang sangat menonjol adalah dimasukaknya unsur lingkungan sebagai faktor kunci dalam manajemen strategis. Apabila ditelusuri tarik ke belakang ternyata konsep dan teori manajemen strategis berkaitan dengan konsep sistem yang hidup dari Durkheinm dan Parsons (Poloma, 1992 : 180-182) menyatakan ada kesamaan antara masyarakat dengan organisasi hidup. Parsons telah menunjukkan bahwa : (1) sistem itu hidup dalam dan beraksi terhadap lingkungan, (2) sistem itu mempertahankan kelangsungan, dan dalam

beberapa hal lebih stabil ketimbang lingkungannya. Menurut Parsons terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup semi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini adalah (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (*sumbu internal-eksternal*), (2) yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan (*sumbu instrumental-0consummatory*). Berdasarkan premis itu secara deduktif Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional. Keempat fungsi primer ini, yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup, adalah (1) *Adaptation* (A) menunjuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem melalui sistem organisme behavioral; (2) *Goal attainment* (G) masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan itu tergantung pada prssyarat *goal attainment* melalui sistem kepribadian (*personality*); (3) *Integration* (I) koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional melalui sistem sosial; (4) *Latent pattern-maintenance* (L) menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa ukuran atau norma-norma melalui sistem kultural. Keempat kesamaan tersebut ditemukan di dalam seluruh sistem, apakah itu sistem politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, biologis dan lain sebagainya. Keempat fungsi itu tertanam kukuh di dalam setiap dasar sistem yang hidup pada seluruh tingkat

organisasi serta tingkat perkembangan evolusioner, mulai dari organisme bersel satu sampai ke peradaban ummat manusia yang paling tertinggi.

Dalam perumusan teori dasar (*Grand Theory*) Parsons, sistem yang hidup merupakan sistem tingkat pertama. Sistem bertindak (*Action Theory*) yang akan menerangkan seluruh pengertian perilaku manusia adalah merupakan sub kelas dari sistem yang hidup atau merupakan sistem tingkat dua. Dengan demikian keempat prasyarat fungsional itu berkaitan dengan hubungan sistem dan lingkungannya serta sarana-sarana melalui mana penyelesaian ini harus dipenuhi (Poloma, 1992 : 183).

Dari uraian penjelasan tentang karakteristik manajemen strategis sebagaiman diuraikan di atas, apabila dilihat dari aspek teori yang berfungsi sebagai menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan sebagai kontrol (*control*) sosial yang dapat diberlakukan secara umum untuk semua jenis dan bentuk organisasi, oleh karenanya selain manajemen strategis dapat diterapkan pada organisasi bisnis, manajemen strategis dapat pula diterapkan pada organisasi publik dan organisasi nonprofit.

D. Manfaat dan Pentingnya Manajemen Strategis Bagi Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit

Membahas konsep manajemen strategis berarti membicarakan hubungan antara organisasi dan lingkungannya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi

dalam lingkungan, sehingga tidak sekadar bersikap memberi reaksi terhadapnya. Dengan begitu, organisasi tetap mampu mengendalikan arah perjalannya menuju sasaran yang dikehendaki. Manajemen strategis semakin penting karena beberapa organisasi umumnya tergantung pada bantuan dari lingkungan eksternal. Dengan demikian, manajemen strategis bermanfaat dan penting bagi organisasi publik dan organisasi nonprofit, dapat dipahami dikarenakan beberapa faktor :

1. Bersifat terbuka

Manajemen strategis bersifat terbuka dalam menerima informasi baru, dan terbuka dalam menerima koreksi. Halini akan memberikan angin segar bagi organisasi yang selalu menantang.

2. Identifikasi pelaung

Dengan manajemen strategis, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang di lingkungan eksternal dansekaligus memanfaatkannya. Ancaman dari lingkungan apat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. Dengan peluang dan kekuatan organisasipun dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Bahkan manajemen strategis dapat memberi petunjuk bagaimana mengantisipasi perubahan awal dari lingkungan eksternal.

3. Perubahan-perubahan Strategis (Sifat yang Dinamis)

Para pimpinan organisasi publik dan nonprofit tidak akan pernah luput dari perubahan-perubahan strategis daam

tubuh organisasinya. Apabila perubahan-perubahan itu mutak harus dilakukan karea terbentur dengan permasalahan, mereka perlu menyesuaikan arah perjalanan organisasi dengan misi dan tujuan yang ingin dicapai. Pada saat itulah konsep manajemen strategis sangat efektif dan bermanfaat.

4. Semangat Korp

Dalam lingkungan organisasi, manajemen strategis mampu menciptakan sinergi dan spirit korp, yaitu semangat korp yang penuh integritas sehingga dapat melicinkan jalan menuju sasaran organisasi. Semangat korp itu tumbuh karena semua kegiatan dalam manajemen strategis lebih terintegrasi, proporsional (komparatif), holistik, intrasektoral, dan fungsional.

5. Mampu Memberi Petunjuk

Manajemen strategis mampu memberi petunjuk bagaimana mangantisipasi masalah-masalah dan peliang di masa yang akan datang, karena kemampuan peramalannya (*forcasting)*.

6. Keputusan yang Bermutu

Manajemen strategis mampu menyediakanm informasi secara lengkap dan akurat kepada para pengambil keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan lebih cepat, tepat waktu dan dapat menghemat biaya.

7. Model Siklus

Manajemen strategis itu modelnya siklus yang berjalan atau berputar terus menerus yang memungkinkan para

pimpinan mengendalikan arah tujuan organisasi dan mampu menyeleksi tindakan mana yang penting dan mana yang tidak penting.

Sungguhpun demikian, janganlah beranggapan bahwa manajemen strategis adalah obat mujarab dalam menyelesaikan berbagai masalah organisasi, jangan dikeramatkan, dan tidak merupakan jaminan keberhasilan organisasi mencapai sasarannya, karena yang lebih terpenting semuanya kembali kepada faktor manusia yang melaksanakannya. Tetapi, setidak-tidaknya lebih membuka jalan ke arah sukses dari pada sama sekali tidak menyentuhnya.

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari bahasan tentang penerapan manajemen strategis pada organisasi publik danorganisasi nonprofit adalah :

1. Ditemukan dan berkembangnya ilmu, adanya sifat dan asumsi dasar dari ilmu, menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial saling berhubungan satu sama lainnya dalam hal menjelaskan fenomena sosial. Dengan demikian secara filosofis dapat saja suatu pendekatan dalam manajemen bisnis dalam hal ini manajemen strategis diterapkan ke dalam organisasi publik dan organisasi nonprofit.
2. Karena manajemen bisnis maupun manajemen publik sama-sama berindukkan kepada ilmu administrasi yang memiliki asas organisasi, prinsip umum manajemen, prinsip manajemen ilmiah dan unsur-unsur manajemen sebagai fungsi manajemen,

meskipun sedikit berbeda pada tahap implementasi dan tujuan yang ingin dicapai, karena adanya perbedaan faktor-faktor lingkungan yang dianalisis dan perbedaan tujuan organisasi, membuat penekanan dalam penerapan manajemen strategis untuk organisasi bisnis, organisasi publik dan organisasi nonprofit tentunya berbeda-beda pula, yang terpenting adalah bagaimana semua unsur-unsur dan persyaratan dari manajemen strategis dapat dipenuhi.

3. Dari uraian penjelasan tentang tiga karakteristik manajemen strategis yang dibangun dari teori sistem yang hidup, teori aksi, dan pendekatan yang kontektual, dan apabila dilihat dari aspek teori yang berfungsi sebagai menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan sebagai kontrol (*control*) sosial yang dapat diberlakukan secara umum untuk semua jenis dan bentuk organisasi, oleh karenanya selain manajemen strategis dapat diterapkan pada organisasi binis, manajemen strategis dapat pula diterapkan pada organisasi publik dan organisasi nonprofit.
4. Manajemen strategis tidak memandang bulu. Ia ada dalam organisasi manapun juga, selain organisasi pemerintahan dan bisnis, manajemen strategis juga ada dalam yayasan, perpustakaan, museum, kursus mengetik, kursus komputer, kursus bahasa asing, organisasi olahraga,organisasi seni dan budaya, organisasi keagamaan, organisasi remaja, LSM dan lain sebagainya.

5. Manajemen strategis bermanfaat dan penting bagi organisasi publik dan organisasi nonprofit, karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu bersifat terbuka, dapat mengidentifikasi peluang, mampu melakukan perubahan-perubahan strategis yang dinamis, dapat menciptakan semangat korp, mampu memberi petunjuk dan mengantisipasi masa depan, melahirkan keputusan yang bermutu, modelnya yang siklus sehingga pemimpin mampu mengendalikan dan menyeleksi tindakan yang bermanfaat.

F. Daftar Kepustakaan

Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial dalam Pembangunan.*Bandung

Andrew, Mc C. dan Chia Lin Send. 1982. *Too Rapid Rural Development.* Athens : Ohio University Press.

Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan.* Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Alvin Y.So. 1990.*Social Chang and Development Modernization, Dependency, and World-System Theories.* London : Sage Publications.

Belling dan totten. 1985. *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan.* Terjemahan Oleh Mien Joebhar dan Hasan Basari. Jakarta : CV Rajawali.

Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga.* Jakarta : Gramedia.

Cernea, Michael M. 1991. *Putting PeopleFirst Sociological Variables in Rural Development.* Washington D.C. : Oxford Uniiuversity Press.

Collier, William. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia.* Colorado: Westerview Boulder.

Eaton, Yoseph W (ed.). 1972. *Guideline to Development Theory Formulations. Institution Building and Development: From Concepts to Application.* London : Sage Publication.

Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff. 1982. *Local Organizations : Intermediares in Rural Development*. Ithaca : Cornell University Press.

Esman, Milton J. 1972. *Institution Building and Development : from concepts to application.* London : Sage Publication.

------------ . 1991. *Management Dimensions of Development : Perspectives and Strategies.* Conecticut : Kumarian Press

Friedman, J. 1981. *The Acrtive Community in Rural Development : National Policies and Experiences.* Nagoya : Maruze Asia.

Hanafiah, T. 1982. *Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah Pembangunan Pedesaan.* Bogor : Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Hansen, Gary E. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia.* Colorado : Westview.

Hirschman, A. 1967. *Development Project Observed.* Washington D.C : Brookings.

Ife, Jim. 1995. *Community Development : Creating Alternatives Visions, Analysis and Practices.* Australia : Longman Inc.

Ismail, Maimunah. 1989. *Pengembangan Implikasi ke Atas Pembangunan Masyarakat.* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan.

Israil, Arturo. 1987. *Tnernational Development, Incentives to Performance.* Baltimore and London: The Jhon Hopkins University Press.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat.* Jakarta: CIDES.

Lele, Uma. 1975. *The Design of Rural Development.* Washington D.C: Jhon Hopkins University Press.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government, How the Enterpreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector.* New York; A Plume Book.


YAYASAN
INDRA EDUCATION COLLEGE

BAB II

MANAJEMEN STRATEGIS SUMBER-SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, birokrasi pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan kearah berbaikan. Perubahan yang dapat dilakukan antara lain mencakup *reengineering, restructuring, quality programs, mergers and acquisition, strategic change,* dan *cultural change*.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip birokrasi pemerintahan yang efektif (Osborne dan Gaebler, 1992:281; Osborne dan Plastrik, 1996:349) dalam perspektif kontekstual (Friedmann, 1981:42; Findley, 1987:19; Bryant dan White, 1989:378; Saefullah,1995:13) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan berdasarkan situasi kondisi internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, tidak dapat diabaikan.

Strategis dan kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan potensi yang ada di pedesaan, tentunya tidak efisien, mengingat pada kenyataannya pedesaan di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik antara satu Desa dengan Desa yang lain (Saefullah, 1995:13). Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan pedesaan sangat ditentukan bagaimana terciptanya kesesuaian antara perencanaan pembangunan yang dibuat dengan potensi yang ada, kebutuhan dan keinginan masyarakat di pedesaan.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 dan PMDN No. 9 Tahun 1982, mensyaratkan agar perencanaan pembangunan diawali dari lapisan terbawah di tingkat Desa. Karena dianggap lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat dan semangat pemerintahan desentralisasi (Sekarang UU No. 22 Tahun 1999).

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Bryant dan White (1989:380) bahwa mengingat sifat hakikat pembangunan dalam jangka panjang dan juga kenyataan pembangunan mencakup kapasitas dan pemerataan serta penumbuhan kekuasaan, perhatian pada strategis dari bawah sekurang-kurangnya akan sekaligus mendorong pemerataan dan efisiensi.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan pedesaan, meskipun hasil penelitian lain telah berusaha mengungkapkan beberapa kendala dan kurang efektifnya perencanaan pembangunan pedesaan di Riau, diantaranya kurang memperhatikan kultur, daya dukung dan kelembagaan masyarakat. Namun hasil penelitian tersebut belum mampu menganalisis, menjelaskan dan memprediksikan secara tuntas perencanaan pembangunan dilihat dari aspek

pendekatan kontekstual dengan sitem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan.

Berdasarkan fenomena yang ditangkap seperti yang disajikan di atas, suatu penelitian yang mendalam perlu dilakukan. Penulis tertarik memilih organisasi pemerintahan pedesaan khususnya yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan pedesaan. Dengan fokus studi tentang sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual di Provinsi Riau.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka masalah pokok penelitian atau pernyataan masalahnya (*problem statement*) adalah:

> *"Perencanaan dan implementasi program pembangunan pedesaan dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan pedesaan belum efektif".*

Dari masalah pokok penelitian ini, diturunkan pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah penelitian (*problem questions*) sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan terhadap implementasi program pembangunan pedesaan.
    a. Bagaimana pengaruh pra kondisi perencanaan strategis terhadap perumusan rencana strategis dalam pembangunan pedesaan.

b. Apakah pra kondisi perencanaan strategis berpengaruh terhadap implementasi program pembangunan pedesaan.

c. Bagaimana pengaruh perumusan rencana strategis terhadap implementasi program pembangunan pedesaan.

2. Bagaimana pengaruh implementasi program pembangunan pedesaan terhadap keberhasilan pembangunan pedesaan.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan duduk perkara tentang sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual. Suatu sistem perencanaan yang didasarkan kepada kegiatan pra kondisi perencanaan strategis, perumusan rencana strategis, implementasi program pembangunan, dan keberhasilan pembangunan, yang seolah-olah ada ketidakjelasan jika dihubungkan dengan konsep dan teori manajemen dan perencanaan strategis.

Sedangkan penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan hubungan pengaruh antara pra kondisi perencanaan strategis, perumusan rencana strategis, implementasi program pembangunan dan keberhasilan pembangunan pedesaan. Terutama dalam melengkapi dan memformulasikan kembali konsep dan teori manajemen dan perencanaan strategis dari Hunger, Wheelen, Steiner, dan Mintzberg. Dalam konsep dan teori manajemen dan perencanaan strategis belum terungkap hubungan pengaruh

antara pengamatan lingkungan (pra kondisi perencanaan) terhadap implementasi strategi (implementasi program).

D. Kegunaan Penelitian

Bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik, kegunaannya adalah menambah keterangan-keterangan pada khasanah keilmuan. Apakah konsep dan teori perencanaan pembangunan dalam lingkup administrasi pembangunan masih terdapat kurang jelas atau apakah prediksi-prediksi masih tepat atau sebaliknya. Sehingga perlu dicarikan keterangan berupa konsep atau teori baru yang dapat memberikan kejelasan tentang perencanaan pembangunan dalam studi administrasi pembangunan.

Adapun kegunaan dari aspek guna laksana setidak-tidaknya akan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan, terutama dalam kebijakan pembangunan masyarakat pedesaan.

E. Kerangka Pemikiran dan Tinjauan Pustaka

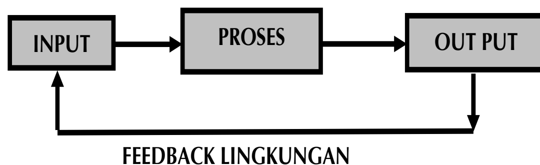
Dalam rangka pencapaian efektivitas pembangunan pedesaan, birokrasi pemerintahan tidak dapat melepaskan diri dari situasi dan kondisi dimana program pembangunan dilaksanakan. Pandangan ini sebagaimana telah dijelaskan dalam lingkup teori administrasi negara yaitu teori sistem terbuka, sebagai *Grand Theory*-nya dalam penelitian ini.

Sistem terbuka dapat diartikan sebagai suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya (Barnard, 1938; Wiener, 1948; Bertalanffy, 1951).

Organisasi sebagai sistem terbuka, menurut Hicks dan Gullet (1987:347) secara umum terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik dari lingkungan. Proses organisasi yang demikian, dijelaskan Kast dan Rosenzweig (1985:112) bahwa the organization receives inputs from the society in the from of people, materials, money, and information; it transforms these into outputs of products, service, and rewards to the organizational members participation.

Dengan demikian organisasi sebagai sistem terbuka, mencakup organisasi itu sendiri dan juga hubungan-hubungannya dengan kelompok-kelompok di luar. Organisasi harus berfungsi dua arah secara serentak. *Pertama*, organisasi harus menemukan cara-cara untuk melestarikan diri, untuk memancing dukungan, energi, dan kerjasama dari anggota-anggotanya. *Kedua*, organisasi harus berusaha melindungi diri dari tekanan-tekanan yang terdapat dalam lingkungannya, menghimpun sumber-sumber daya, dan dukungan dari pihak-pihak lain. Model organisasi sebagai sistem terbuka, diilustrasikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Model Organisasi Sebagai Sistem Terbuka dari (Barnard, 1938, Wiener, 1948, Bertalanffy, 1951, Katz dan Kahn, 1987)



Sumber: *Hicks dan Gullet (1987:347)*

Organisasi pemerintahan pedesaan sebagai sistem terbuka dalam pencapaian tujuannya merupakan kelembagaan yang harus ditata secara rasional. Sedangkan manajemen pemerintahan pedesaan menjadi perantara kedua fungsi tersebut, menentukan berapa banyak *out put* yang dihasilkan, siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan.

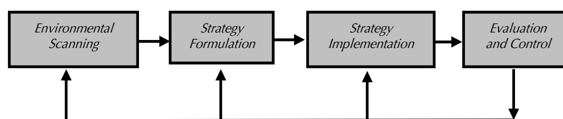
Dalam kaitan ini, variabel-variabel situasi dan kondisi internal dan eksternal di pedesaan adalah sangat penting, karena dapat menentukan efektivitas manajemen pembangunan pedesaan. Sedangkan manajemen pembangunan yang efektif dalam organisasi sebagai sistem terbuka, adalah manajemen pembangunan yang mengakomodasi dan memperhitungkan variabel-variabel situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal di pedesaan. Dengan demikian manajemen pembangunan yang dianggap efektif adalah manajemen strategis.

Hunger dan Wheelen (1996:7) mengemukakan suatu konsep dan teori manajemen strategis, dengan menyatakan: *The process of strategic management involves four basic elements: (1) environmental scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4) evaluation and control.*

Proses manajemen strategis tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.

Proses Manajemen Strategi dari Hunger dan Wheelen



Sumber: *Hunger dan Wheelen (1996)*

Apabila proses manajemen strategis tersebut, dikaitkan dengan manajemen pembangunan pedesaan, maka akan meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal di pedesaan untuk melihat kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan internal di pedesaan untuk melihat kekuatan dan kelemahan (S.W.O.T) yang disebut faktor strategis. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi organisasi pemerintahan yang sesuai. Langkah peratama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang berperanan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran, dan prosedur. Akhirnya, evaluasi kinerja dan umpan balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas organisasi.

Paling tidak ada empat fungsi manajemen yang harus dilaksanakan organisasi pemerintahan dalam proses pembangunan. Dari beberapa fungsi manajemen tersebut fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pokok dan sangat mendasar, sebagaimana dinyatakan Terry (1975:191) bahwa: *Planning is a fundamental function of management. Planning is vital in management. As a matter of fact, planning for organizing, planning for actuating, and planning for controlling are requisites of effective management.*

Berdasarkan konsep dan teori manajemen strategis, tampak dengan jelas ada keterkaitan unsur manajemen strategis. Diantara unsur tersebut perencanaan strategis merupakan fungsi yang pokok dan sangat mendasar, dan

dapat dikatan sebagai inti dan syarat efektivitas manajemen strategis. Artinya perencanaan strategis membentuk suatu sistem dan proses manajemen strategis.

Sistem perencanaan yang dapat menjelaskan pembangunan pedesaan yang didasarkan kepada potensi setempat, keinginan dan harapan masyarakat pedesaan adalah tentunya sistem terbuka perencanaan strategis, karena formulasinya didasarkan kepada pendekatan yang kontekstual.

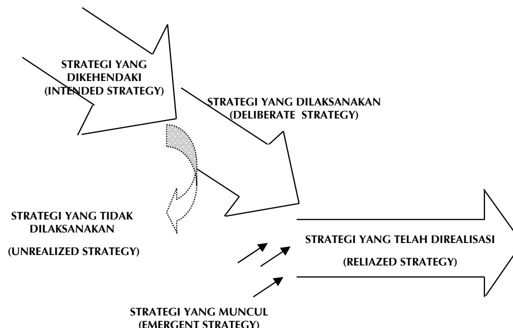
Suatu model perencanaan strategis *(model of strategic planning)*, sebagaimana yang dikemukakan Steiner (1979:33) adalah sebagai suatu sistem yang saling berhubungan antara variabel : *(1) Evaluation of external and internal opportunities and problems, organization strengths and weaknesses; (2) Strategy formulation and plans (organization missions, long range objectives, policies, strategies); and (3) Implement and review.*

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan strategis, Mintzberg (1994:36–37) menyatakan pula bahwa : *Strategic planning is created at the intersection. Outside opportunities are exploited by inside strengths, while threats are avoided and weaknesses circumvented. Taken into consideration, bath in the creation of the strategies and their subsequent evaluation to choose the best.*

Berkaitan dengan perencanaan strategis ada beberapa strategi yang dikembangkan, yaitu: strategi yang dikehendaki *(intended strategy)*, strategi yang dilaksanakan *(deliberate stategy)*, strategi yang tidak dilaksanakan (unrealized strategy), strategi yang muncul *(emergent strategy)* dan strategi yang telah direalisasi *(realized strategy)*.

Dengan fungsi evaluasi dan pengawasan dalam implementasi program dari sistem terbuka perencanaan strategis dapat pula mendeteksi strategi yang muncul *(emergent strategy)* kemudian. Jadi dengan evaluasi dan pengawasan, manajemen strategis dapat mengetahui keluar masuk unrealized strategy dan emergency strategy. Keluar masuk kedua strategi ini akan menghasilkan "saldo" atau merupakan strategi yang telah direalisasi *(realized strategy)*. Mintzberg (1994:24) merangkum proses keluar masuk strategi-strategi dalam model pada gambar: 2.3.

Gambar 2.3.
Bentuk-bentuk Strategi dari Mintzberg dan Winardi



Sumber : *Mintzberg (1994:24) dan Winardi (1997)*

Konsep dan teori perencanaan strategis dari Hunger, Wheelen, Steiner dan Mintzberg tersebut, memberikan kejelasan pentingnya sistem perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual. Selain karena faktor pengamatan situasi dan kondisi internal dan eksternal akan memberikan informasi dan data yang tepat, rencana dan implementasi program akan efektif pula.

F. Premis

Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis bertitik tolak pada premis pendukung hipotesis sebagai berikut:

a. Pengamatan lingkungan (*environmental scanning)* internal organisasi yaitu struktur, budaya dan sumber-sumber daya organisasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial organisasi; mempengaruhi perumusan strategi (Mintzberg, 1994; Saefullah, 1995; Hunger dan Wheelen, 1996; Winardi, 1999).

b. Perumusan strategi (*strategy formulation)* yaitu visi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan rencana jangka panjang, menengah dan pendek; mempengaruhi implementasi strategi (Mintzberg, 1994; Saefullah, 1995; Hunger dan Wheelen, 1996; Winardi, 1999).

c. Implementasi strategi (*strategy implementation)* yaitu proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur; tidak akan langsung dipengaruhi oleh pengamatan lingkungan (*environmental scanning)* internal dan eksternal organisasi; pengaruhnya akan ada setelah melalui perumusan strategi (Mintzberg, 1994; Hunger dan Wheelen, 1996).

d. Implementasi strategi (*strategy implementation)* akan efektif, apabila didasarkan kepada pengamatan lingkungan (*environmental scanning)* internal dan eksternal organisasi, serta didasarkan kepada

perumusan strategi (Mintzberg, 1994; Hunger and Wheelen, 1996; Winardi, 1999).

e. Keluaran (*out come*) akan optimal, apabila implementasi strategi (*strategy implementation)* didasarkan kepada pengamatan lingkungan (*environmental scanning)* internal dan eksternal organisasi, serta didasarkan kepada perumusan strategi (Bryand dan White, 1987; Hunger and Wheelen, 1996; Winardi, 1999).

G. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang didasarkan kepada pra kondisi perencanaan strategis dan perumusan rencana strategis berpengaruh terhadap implementasi program pembangunan pedesaan.

   a. Sub Hipotesis 1 :

      Pra kondisi perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan berpengaruh terhadap perumusan rencana strategis pembangunan pedesaan.

   b. Sub Hipotesis 2 :

      Pra kondisi perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan tidak berpengaruh langsung terhadap implementasi program pembangunan pedesaan.

c. Sub Hipotesis 3 :

Perumusan rencana strategis pembangunan pedesaan berpengaruh terhadap implementasi program pembangunan pedesaan.

2. Implementasi program pembangunan pedesaan yang didasarkan kepada perencanaan strategis berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan pedesaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey*. Sebagai populasi adalah seluruhan Desa/Kelurahan tersebar di 12 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Riau yang berjumlah 824 Desa/Kelurahan. Teknik penarikan sampel Desa/Kelurahan dengan metode *Cluster Sampling* dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Untuk menentukan Desa/Kelurahan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling* dengan cara mengundi, maka diperoleh Desa/Kelurahan sampel, yaitu Desa : Teratak Buluh, Kampar, Pangkalan Kerinci, Lubuk Gaung, Pulau Burung, Meskom, Buru, Nongsa, dan Panggak Laut.

Selanjutnya jumlah sampel minimal sebagai responden dari aparat dan anggota masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, berdasarkan rumus yang dipergunakan berjumlah 331 responden. Kelompok Sampel yang jumlahnya sedikit, semuanya diambil menggunakan metode Sensus, sedangkan kelompok sampel yang jumlahnya cukup banyak diambil dengan metode *Simple Random Sampling* dengan cara mengundi.

Untuk memperkuat dan mempertajam hasil analisis ditetapkan sejumlah 90 informan, dengan kriteria sebagai pimpinan kelembagaan dalam masyarakat, terdiri dari : tokoh SDM, tokoh perekonomian, tokoh sosial-budaya, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh keamanan.

Teknik pengumpulan data melalui : observasi partisipasi aktif, studi dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Uji validitas instrumen dengan korelasi Rank Spearman, dan uji reliabilitas instrumen dengan korelasi Product-Moment Pearson.

Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif (observasi terlibat dan wawancara kepada informan), dan pendekatan kuantitatif (dengan uji statistik *Structural Equation Modeling*/SEM).

I. Hasil Penelitian

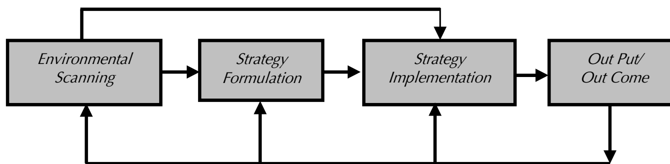
(1) Terdapat hubungan pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 66,42 % antara perencanaan strategis terhadap implementasi program; (2) hubungan pengaruh yang sangat positif dan signifikan sebesar 92,16 % antara pra kondisi perencanaan strategis terhadap perumusan rencana strategis; (3) pengaruh yang sangat kurang positif antara perumusan rencana strategis terhadap implementasi program sebesar 12,25 %; (4) pengaruh yang sangat positif dan signifikan antara implementasi program terhadap keberhasilan pembangunan pedesaan sebesar 82,81 %; dan (5) Terdapat pula hubungan pengaruh yang cukup positif dan signifikan sebesar 44, 89 % antara pengamatan lingkungan (pra kondisi perencanaan strategis) terhadap

implementasi strategi (implementasi program), melalui strategi yang muncul kemudian (emergent strategy). Sebagai akibat perubahan lingkungan internal dan eksternal secara terus-menerus yang begitu cepat.

Jika hubungan itu digambarkan dalam proses manajemen strategis, hubungan tersebut merupakan temuan penulis. Dapat diilustrasikan pada gambar 2.4.

Gambar 2.4.

Model Manajemen Strategis Sufian (2002)



Keterangan:

→ : Tanda panah dari *Environmental Scanning* menuju *Strategy Implementation* merupakan temuan baru penulis.

Pola hubungan antara pengaruh pengamatan lingkungan terhadap implementasi strategi, dengan pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi bersifat berbanding terbalik. Artinya, jika pengaruh pengamatan lingkungan terhadap implementasi strategi sangat kuat, maka pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi menjadi sangat lemah, demikian pula sebaliknya.

Pengamatan lingkungan tidak saja bermanfaat untuk perumusan rencana strategis, melainkan juga diperlukan disaat implementasi strategi. Dengan demikian perencanaan

strategis akan efektif dan efisien apabila perumusan rencana-rencana strategis mendekati situasi dan kondisi lingkungan yang sebenarnya atau kontekstual. Sehingga pada saat implementasi program, strategi yang muncul kemudian *(emergent strategy)* tidak begitu mempengaruhi rencana-rencana yang telah dirumuskan.

Dengan demikian perencanaan strategis tidak hanya sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat mendasar dan meresap keseluruhan fungsi manajemen yang lain, melainkan merupakan suatu sistem terbuka.

Konsep baru dari sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual dalam administrasi publik yaitu suatu proses kegiatan yang terdiri dari :

a. Pra kondisi perencanaan strategis (Policy Analysis) yaitu analisis lingkungan internal pedesaan (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal pedesaan (peluang dan tantangan) yang terdiri dari : analisis potensi alam, analisis potensi masyarakat, analisis keadaan pemerintahan Desa, analisis sumber pendapatan Desa, analisis kebutuhan masyarakat Desa, analisis kebijakan Pemerintah, analisis kebutuhan pasar dari sumber Desa, analisis perkembangan teknologi, dan analisis investasi Pemerintah dan swasta nasional.
b. Perumusan rencana strategis *(Policy Formulation)* yaitu membangun rencana jangka panjang, menengah dan rencana jangka pendek untuk efektivitas manajemen pembangunan dari peluang dan tantangan lingkungan pedesaan dikaitkan dengan kekuatan dan

kelemahan pedesaan, yang terdiri dari : organisasi perencanaan, merumuskan tujuan, merumuskan sasaran, merumuskan program, organisasi atau tim pelaksana program, sumber-sumber yang diperlukan, dan pengambilan keputusan.

c. Menentukan efektivitas implementasi program pembangunan *(Policy Implementation)* yang terdiri dari: pengorganisasian sumber-sumber daya pembangunan, penggerakan sumber-sumber daya pembangunan, evaluasi dan pengawasan program pembangunan pedesaan dalam rangka menemukan strategi yang muncul kemudian (emergent strategy).
d. Menentukan tingkat keberhasilan pembangunan pedesaan *(Policy Out Come)* yang terdiri dari : bidang pembangunan kualitas sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, fasilitas umum Desa, keadaan lingkungan hidup Desa, keadilan sosial masyarakat, partisipasi masyarakat, dan pendapatan keuangan Desa.
e. Menentukan unpan balik *(Policy Feedback)* dalam rangka perbaikan perencanaan strategis selanjutnya.

Konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual tersebut apabila diterapkan pada pembangunan pedesaan akan lebih efektif dan efisien. Dengan argumen bahwa konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual memberikan nilai tambah, yaitu :

a. Memperlihatkan adanya reformasi administrasi dalam perbaikan sistem perencanaan pembangunan

yang selama ini telah dipolakan dalam peraturan perundangan.

b. Perencanaan pembanguan pedesaan dirumuskan atas dasar nilai efektivitas dan efisiensinya bukan atas dasar kepentingan kelompok.
c. Pendekatan pembangunan pedesaan lebih kontekstual dengan asumsi bahwa faktor-faktor lingkungan adalah penting, mengingat dalam peraktek selama ini faktor-faktor lingkungan kurang dipertimbangkan dalam sistem perencanaan pembangunan.
d. Dalam proses pembangunan pedesaan lebih menekankan kepada adanya proses pembelajaran kepada masyarakat lokal
e. Dengan sistem terbuka perencanaan strategis selalu berusaha menjaga keberadaan dan keberlanjutan melalui kestabilan situasi dan kondisi internal dan eksternal secara proporsional (komparatif), holistik, intrasektoral, dan fungsional.

Manakala perencanaan strategis diterapkan secara tepat dalam lingkungan administrasi publik dan nirlaba, perencanaan strategis akan memberikan sekumpulan konsep, prosedur, dan alat untuk mengamati lingkungan, merumuskan dan mengimplementasikan strategi, karena prinsip-prinsip dan praktek perencanaan strategis yang efektif dapat diterapkan pada organisasi publik sama seperti pada organisasi bisnis.

Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa disetiap tingkatan perumusan rencana pembangunan : Nasional,

Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Desa diperlukan penerapan sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual. Selanjutnya, tidak ada alasan untuk meragukan efektivitas penerapan sistem terbuka perencanaan strategis pada organisasi pemerintahan pedesaan. Meskipun organisasi pemerintahan pedesaan termasuk kategori organisasi yang masih sederhana. Namun asas, prinsip dan unsur manajemen yang berorientasi kepada kualitas, keilmuan, dan kelompok (Manajemen *Joiner Triangle*) tidak terbatas dalam penerapan maupun pengembangannya, dari organisasi yang primitif sampai kepada organisasi yang paling modern, pada organisasi publik maupun organisasi bisnis.

Dalam rangka efektivitas konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual memerlukan pula beberapa persyaratan yang harus selalu terpenuhi, yaitu :

a. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan kontinuitas.
b. Sumber daya manusia yang handal.
c. Peralatan dan bahan atau perlengakapan organisasi yang memadai.
d. Sumber pendanaan yang cukup.
e. Adanya kemauan politik pemerintah untuk mereformasi administrasi.

Paling tidak ada sembilan karakteristik pedesaan yang masing-masingnya menggambarkan potensi alam dan potensi masyarakatnya. Dengan demikian model pembangunan pedesaan yang seharusnya dikembangkan dalam konsep

sistem terbuka perencanaan strategis pembangunan pedesaan yang kontekstual, adalah model-model : Desa persawahan, Desa perladangan, Desa perkebunan, Desa peternakan, Desa perikanan, Desa industri besar dan sedang, Desa industri kecil dan kerajinan, Desa jasa dan perdagangan, dan Desa pariwisata.

J. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Temuan penelitian adalah melengkapi dan memformulasikan kembali konsep dan teori manajemen strategis dan perencanaan strategis dari Hunger, Wheelen, Steiner, dan Mintzberg. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan pengaruh yang cukup kuat antara pengamatan lingkungan terhadap implementasi strategi melalui strategi yang muncul kemudian *(emergent strategy)*. Sebagai akibat perubahan lingkungan internal dan eksternal secara terus-menerus yang begitu cepat.
2. Pola hubungan antara pengaruh pengamatan lingkungan terhadap implementasi strategi, dengan pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi bersifat berbanding terbalik. Artinya, jika pengaruh pengamatan lingkungan terhadap implementasi strategi sangat kuat, maka pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi menjadi sangat lemah, demikian pula sebaliknya.

3. Pengamatan lingkungan tidak saja bermanfaat untuk perumusan rencana strategis, melainkan juga diperlukan disaat implementasi strategi. Dengan demikian perencanaan strategis akan efektif dan efisien apabila perumusan rencana-rencana strategis mendekati situasi dan kondisi lingkungan yang sebenarnya atau kontekstual. Sehingga disaat implementasi program, strategi yang muncul kemudian (emergent strategy) tidak begutu mempengaruhi rencana-rencana yang telah dirumuskan. Dengan demikian out put atau aut came akan optimal.

2. Saran

1. Pembangunan pedesaan dimasa yang akan datang sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat, ciri dan potensinya serta tidak dapat disamakan atau diseragamkan begitu saja keseluruh Desa-desa lain. Pendekatan pembangunan yang dimaksud adalah pendekatan pembangunan yang kontekstual dengan konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan.
2. Dimasa yang akan datang sebaiknya menerapkan konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual, baik di tingkat perumusan pembangunan Nasional, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Desa. Prosesnya dimulai dari kegiatan pra kondisi perencanaan strategis, perumusan rencana strategis,

implementasi program pembangunan dan keberhasilan pembangunan pedesaan.

3. Dalam rangka penerapan konsep sistem terbuka perencanaan strategis pembangunan pedesaan, dimasa yang akan datang sebaiknya dibentuk satu urusan di lingkungan pemerintahan pedesaan yang mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan, mengolah dan membuat pelaporan, tentang situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal di pedesaan.
4. Dalam rangka efektivitas konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan, harus pula meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Upaya-upaya besar tersebut merupakan bagian dari konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang konsektual, antara lain :
   a. Memberdayakan ekonomi masyarakat Desa.
   b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur Pemerintah dan masyarakat di pedesaan.
   c. Memfungsikan semua lembaga-lembaga yang ada termasuk instansi terkait yang bertugas sebagai pelopor (*agen*) pembangunan di pedesaan.
   d. Membimbing dan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif.

e. Membangun sarana dan prasarana pedesaan serta memberikan kemudahan bagi para investor nasional dan internasional untuk berinvestasi di pedesaan dengan sistem perkebunan inti rakyat (hubungan bapak dan anak angkat).

f. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan kondisi dan struktur tanah, potensi alam dan potensi masyarakat serta kondisi permintaan pasar.

K. Daftar Kepustakaan

Anthony, William P. 1991. *Practical Strategic Planning A Guide and Manual for Line Manager.* Tokyo : Toppan Co, Ltd.

Ansoff, I. 1998. Strategic Issue Management. *Journal Strategic Management.* 1 (2). 131-148.

Ansoff, I. Declerk R., dan Hayes R. 1999. From Strategic Planning to Strategic Management. *Journal Strategic Management.* 3 (2), 197-211.

Beling dan Totten. 1985. *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*. Terjemahan oleh Mien Joebhar dan Hasan Basari. Jakarta : CV Rajawali.

Bloom, C. 2000. Strategic Planning in the Public Sector. *Journal of Planning Literature*. 1 (2), 253-259.

Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian, Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interests and Institutions.: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Basil Blackwell.

Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.

Bryson, J. M. 1991. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.* San Francisco :Jossey-Bass Publishers.

BAB III

PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Masalah pembangunan dan pembinaan masyarakat pedesaan memang harus menjadi pusat perhatian pemerintah dan kita semua, karena daerah pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun masyarakat pedesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena lebih dari 80 % penduduk Indonesia tersebar di desa-desa di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia harus menjadi pusat perhatian yang lebih serius dalam pembangunan Nasional.

Upaya-upaya pemerintah dan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan memang telah ada, misalnya dengan membuat berbagai kebijakan melalui Inpres dalam bentuk subsidi pembangunan, IDT, BIMAS, INMAS, BANPRES, KB, PKT dan lain sebagainya, tetapi usaha-usaha tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kondisi masyarakat di pedesaan masih tetap miskin dan bahkan porsentase

masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih menunjukkan angka yang cukup besar.

Menurut Sri Edi Swasono (dalam Bunga Rampai SESKOAD, 1994 : 111) menyebutkan, "di Negara kita ada 27,2 juta penduduk miskin (1990), 9,4 juta berada di kota dan 17,8 juta berada di desa. Kita memiliki 20.633 (31,47 %) desa miskin (1993) dari 65.554 desa yang ada. Dari 20.633 desa miskin tersebut, 12.940 desa berada di Kawasan Timur Indonesia". Dan menurut Mubyarto (dalam Bunga Rampai SESKOAD, 1994 : 245 – 246) menyebutkan, "ada 25,9 juta orang Indonesia dikategorikan miskin (1993) yaitu 8,7 juta (13,5 %) di perkotaan dan 17,2 juta (13,8) di pedesaan. Dan desa tertinggal di Indonesia seluruhnya berjumlah 20.633 desa".

Di Provinsi Riau, menurut (Bappeda Tkt I) jumlah desa tertinggal 560 desa (1995), penduduk miskin di desa sebanyak 329.264 jiwa (1993) dan desa tertinggal parah 102 desa (1995).

Dari beberapa sumber data dan informasi yang ada memang tidak ada data yang pasti, namun apabila kita berkunjung ke desa-desa tidak dapat kita mungkiri masyarakat desa yang miskin memang masih ada.

Kemiskinan masyarakat pedesaan itu ditandai dengan gejala-gejala yang ada antara lain :

a. Terbatasnya modal dan tenaga ahli;
b. Pereknomian masih rendah yang ditandai dengan rendahnya pendapatan masyarakat sebagai individu;
c. Sangat sedikit sekali penerapan ilmu dan teknologi dalam kegiatan masyarakat;

d. Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer agraris sederhana;
e. Sarana dan prasarana masih kurang;
f. Kekayaan alam masih berupa kekayaan potensial yang belum banyak dimanfaatkan;
g. Masyarakat masih terikat kuat oleh tradisi (adat istiadat);
h. Komunikasi masih banyak dilakuka secara lisan;
i. Pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat masih rendah;
j. Aspirasi terbatas dan pandangan hidupnya sederhana.

Dari berbagai fakta yang ada tentang kondisi masyarakat pedesaan kita yang sebahagiannya masih miskin, kajian atau pemikiran yang akan diungkapkan pada makalah ini diharapkan merupakan salah satu sumbangan pemikiran yang berarti bagi upaya-upaya untuk membantu masyarakat kita yang berada di pedesaan untuk dapat merubah kondisinya yang relatif kurang baik kepada keadaan yang lebih baik.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, sebagai pernyataan penelitian adalah bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui pembangunan berbagai bidang telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Dengan demikian dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah :

"Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan?"

3. Kerangka Teoritis

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak lain melaksanakan pembangunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1993:4) pembangunan diartikan sebagai: *"Upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai pandangan masyarakat bangsa itu".*

Taliziduhu Ndraha (1986:1-2) memberikan pengertian pembangunan bertalian dengan konsep: *"Konsep pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembaharuan, pembangunan bangsa, pembangunan nasional, pengembangan dan pembinaan".*

Pendapat lain dikemukakan Kusnaedi (1995:38): *"Pembangunan berkaitan dengan proses pertumbuhan (growth), pemulihan keadaan sosial/rekonstruksi (recontruction), modernisasi (modernization), perubahan sosial (social change), pembaharuan (inovation), dan pembebasan (liberation)*.

Dari tiga (3) pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dirumuskan pembangunan *(development)* sering diartikan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi kepada kondisi lebih baik yang menyangkut sikap, pola pikir, dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Pembangunan dapat berarti pula suatu usaha merubah pola pikir, perilaku dan sikap primitif ke arah kemajuan/modernisasi melalui rekonstruksi dan reformasi tatanan sosial.

Jika mengacu kepada konsep Pembangunan bangsa Indonesia lebih luas lagi, karena pembangunan di Indonesia menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan mulai dari

pembangunan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan HANKAM.

Dalam masa Pembangunan Jangka Panjang yang pertama, Indonesia berusaha menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45, membangun kemampuan dan membangun berkeadilan. Pada awal PJPT II tepatnya REPELITA VI kita sedang menuju era tinggal landas, kebijakan pembangunan kita menitikberatkan pada pembangunan ekonomi diiringi peningkatan sumber daya manusia dan tetap mengacu kepada trilogi pembangunan yang merupakan sebagai kriteria dasar dan kerangka acuan (frame of reference) sebagai manajemen kebijakan pembangunan di Indonesia. Landasan acuan trilogi pembangunan yang tetap menjadi pedoman bagi pembangunan di Indonesia tidak lain adalah :

1. Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Kesemuanya sama penting dan saling terkait, saling mendukung. Kalau kita mengacu kepada pendapat Bintoro Tjokroamidjojo (1993:15-17): “Ada lima dimensi penting dalam proses pembangunan”, yaitu:

1. Kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikatornya pertumbuhan ekonomi tetap penting karena lebih mudah dihitung (quantifiable), ukuran-ukuran

seperti : tingkat produksi, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan berbagai ukuran dari keadilan ekonomi, seperti; pembagian pendapatan, perluasan kesempatan kerja, kesempatan belajar dan harapan hidup.

2. Tranformasi sosial dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju *(modern)*, sebagai ukuran, perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial *(value change)*, urnanisasi, pendidikan dan tranformasi komunikasi.
3. Pembangunan bangsa *(Nation Building Concept)*. Di sini dilihat perkembangan masyarakat dari primordial ke arah masyarakat nasional. Proses integrasi nasional dengan mengembangkan kepribadian, ideologi dan wawasan kebangsaan, termasuk integrasi, stabilitas, dan partisipasi politik.
4. Menempatkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya, dalam proses pembangunan. Manusia mengolah sumber daya alam yang terbatas harus berwawasan lingkungan.
5. Memusatkan perhatian manusia sebagai pusat perhatian proses pembangunan.

Kegiatan Pembangunan harus pula berperan sebagi agen perubahan *(agent of change)*. Sebagai agen perubahan sifatnya berorientasi pada pelaksanaan dan pemecahan masalah. Kriteria dasarnya sebagaimana yang dikatakan Syukur Abdullah (1985) :

1. Pengembangan kapasitas *(potential capacities);*
2. Transfer teknologi;

3. Transfer nilai;
4. Partisifasi termasuk pemerataan.

Untuk melaksanakan pembangunan memang tidak dapat dilakukan dengan baik apabila administrator pembangunan dan masyarakat tidak mengacu kepada penerapan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana mengelola kegiatan pembangunan sehingga efektif dan efisien, manajemennya yang harus baik. Dalam hal ini Bintoro Tjokroamidjojo (1993:68) menyatakan, bahwa "manajemen kebijakan pembangunan dapat dibagi tiga bidang, yaitu :

1. Manajemen analisa dan perumusan kebijakan pembangunan;
2. Manajemen pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan pembangunan;
3. Manajemen Pengawasan kebijaksanaan pembangunan.

Selain manajemennya yang baik untuk melakukan pembangunan, kualitas manusianya juga harus baik, baik administrator pembangunan maupun masyarakatnya.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1993:183) peningkatan kualitas manusia administrasi pembangunan ditujukan pada tiga aspek kualitas yang penting :

1. Keterampilan dan kemampuannya, baik kemampuan profesional maupun manajerial;
2. Mempunyai dedikasi dan motivasi, mengabdi, melaksanakan tugas, menunaikan amanat, serta sikap pelayanan kepada masyarakat;

3. Sikap mental, punya etos kerja, tertib, tanggap, jujur, disiplin, kerja keras, produktif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Selain dari meningkatkan kualitas administrator, kualitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan juga memantapkan manajemen pembangunan. Hal mendasar lain yang perlu menjadi perhatian di dalam pembangunan masyarakat adalah pertumbuhan *(growth)*. Pembangunan dalam pengertian pertumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurut Kusnaedi (1995:38): Proses pertumbuhan ekonomi menyangkut kegiatan sebagai berikut :

1. Merubah kegiatan ekonomi masyarakat dari yang bersifat agraris menuju arah industrialis;
2. Upaya meningkatkan penghasilan, baik individu maupun kelompok masyarakat;
3. Meningkatkan produktivitas agar tumbuh menjadi efisien dan efektif;
4. Peningkatan jangkauan ekonomi yang lebih luas sampai pada tingkat Internasional;
5. Meningkatkan transformasi struktur ekonomi ke arah pola dan praktek modern;
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin dalam memperhatikan kelestariannya.

Selanjutnya dalam hal yang sama Michael Todaro (dalam Taliziduhu Ndraha:3) menyatakan: Ada beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya :

1. Akumulasi (penimbunan) modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
2. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja, baik kuantitas, maupun kualitas;
3. Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Dalam kegiatan pembangunan perlu pula melakukan perubahan teknik atau cara-cara tradisional ke arah cara-cara modern dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada semua segi kehidupan. Dalam hal ini menurut Kusnaedi (1995:39) menyatakan "proses modernisasi meliputi kegiatan :

1. Menerapkan ilmu dan teknologi pada kegiatan manusia;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi;
3. Merubah kegiatan industri dari pada karya menjadi padat modal;
4. Meningkatkan kualitas produk;
5. Meningkatkan kecepatan melipat gandakan kuantitas produk.

Kalau kita mengacu pendapat Coralie Bryant (1982:372-375) menyebutkan ada tiga (3) pendekatan terhadap pembangunan pedesaan :

1. Pembangunan pedesaan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi. Misalnya dalam penggunaan

pupuk, racun hama tanaman, irigasi dan penggunaan mesin-mesin produksi.

2. Perbaikan sarana produksi bagi petani di pedesaan.
3. Memberikan kekuasaan pada petani di pedesaan, menuntut lebih luas mengenai pendapatan dan kebutuhan pedesaan. Resep kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk koperasi, organisasi petani, perhatian pada reformasi agraria dan program-program pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja.

Selain itu juga usaha perluasan dan pengembangan di bidang pertanian merupakan langkah yang baik karena hasil pertanian terus dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, menambah pendapatan negara sebagai ekspor non-migas. Dalam hal ini petani atau usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan di bidang pertanian sebagaimana yang dikatakan Yovita Hetty Indiani (1992) yaitu :

1. Pemilihan tanaman harus sesuai dengan kondisi lahan yang dimiliki masyarakat di pedesaan;
2. Memilih tanaman yang sesuai dengan permintaan pasar dalam negeri ataupun Internasional.

Penulis berpendapat bahwa untuk tanaman sektor perkebunan dan hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran) dalam rangka untuk mendapatkan informasi permintaan pasar baik lokal, nasional dan internasional diharapkan pula peran Pemerintah atau instansi terkait untuk mengumpulkan informasi kemudian menyampaikan kepada masyarakat petani di pedesaan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam membangun suatu masyarakat adalah usaha menggerakkan partisipasi masyarakat. Kusnaedi (1995:48) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menggunakan prinsip pertukaran dasar, yaitu melalui pendekatan timbal balik manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat;
2. Memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial sehingga motivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi;
3. Kegiatan pembangunan harus bersifat dan berfungsi sebagai stimulan yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat;
4. Rancangan pembangunan harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melibatkan diri;
5. Menyelaraskan program-program pembangunan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
6. Melibatkan masyarakat dalam membuat suatu rencana dan keputusan.

Dari uraian kerangka teoritis tersebut di atas, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah melaksanakan pembangunan pada bidang-bidang berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat di pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan;

2. Memfungsikan semua lembaga-lembaga yang ada termasuk instansi terkait yang bertugas sebagai agen pembangunan di pedesaan, terutama lembaga perekonomian rakyat, misalnya lembaga permodalan dan KUD;
3. Membimbing dan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif, serta memberikan contoh dalam kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan, dll dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh petugas-petugas lapangan dari pemerintah (aparatur pemerintah, pejabat profesi, PPL, sarjana penggerak pembangunan, dll), pemuka masyarakat, beberapa anggota masyarakat yang sudah berhasil, Lembaga-lembaga sosial dan lembaga perguruan tinggi (melalui KKN atau PKL mahasiswa dari berbagai disiplin iptek);
4. Mendorong, membangun infrastruktur dan memberikan kemudahan bagi para investor nasional atau internasional untuk menanamkan investasi di pedesaan dengan melakukan sistem perkebunan inti rakyat (hubungan Bapak dengan anak angkat).
5. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan (tanaman yang sesuai dengan struktur tanah) dan kondisi permintaan pasar. Sehingga dalam kegiatan pertanian tercapai efisiensi dalam mengolah pertanian atau mencegah pengorbanan yang terlalu besar untuk memperoleh hasil maksimal.

B. Pembahasan

Banyak usaha yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk di pedesaan melalui pembangunan. Namun menurut hemat penulis ada beberapa pemikiran pokok yang penting yang akan dibahas pada bagian berikut ini dapat dijadikan masukan untuk pembangunan masyarakat pedesaan.

1. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Di desa selalu ada dua (2) tokoh kepemimpinan, yaitu tokoh formal dan informal. Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan warganya sehingga besar pengaruhnya pada masyarakat. Tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai kekuatan hukum. Tokoh formal antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa;
c. Kepala-kepala Dusun;
d. Kepala-kepala Urusan;
e. Anggota-anggota LMD;
f. Para ketua dan seksi LKMD;
g. Pengurus PKK;
h. Semua RK dan RW;
i. Semua petugas Instansi Terkait dalam pembangunan desa ;
    - Dephankam: Babinsa, Koramil, Bimpolda dari Polsek;

- Dep. P dan K: Penilik SD, Penilik Olah Raga, Penilik Pendidikan di Puskesmas;
- Dep. Kesehatan: Dokter, juru rawat, sanitarian di Puskesmas;
- Dep. Pertanian: PPL, mantri kehewanan, polisi hutan, penyuluh penghijauan, mantri perikanan;
- Dep. PU: Petugas Pengairan (P3S);
- TSKT, Sarjana Penggerak Pembanguan Desa;
- Dep. Transmigrasi: Penerangan Transmigrasi;
- Sep. Sosial: TKSS, PSM, PSK;
- Dep. Penerangan: juru penerangan;
- Dep. Koperasi: Petugas penerangan KUD;
- Dep. Perindustrian dan Perdagangan: Petugas proyel BIPIK Perindustrian;
- BKKBAN: PLKB;
- BRI: Petugas BRI Unit Desa;
- Perguruan Tinggi: Mahasiswa KKN atau PKL.

Sementara itu, Tokoh informal antara lain sebagai berikut: :

a. Pemuka agama;
b. Pemuka adat;
c. Tokoh yayasan sosial dan pendidikan;
d. Tokoh pemuda;
e. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
f. Pimpinan Orsospol Komisariat Desa;
g. Kelompok tani dan nelayan;

h. Kelompencapir;
i. Dan lain-lain sebagainya sebagai tokoh informal.

Kedua kelompok tokoh tersebut merupakan kekuatan yang sangat besar jika dapat dipersatukan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Namun sumber daya manusia tergolong tokoh informal dan informal ini harus ditingkat pengetahuannya, melalui pendidikan ataupun pelatihan. Karena mereka ini merupakan tokoh bagi masyarakat yang lainnya. Dan merekla inilah nantinya menjadi sasaran pembinaan utama dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya pembangunan pertanian pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dll, selain dari mereka juga tetap melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.

Di harapkan apabila tokoh masyarakat ini berhasil maka masyarakat yang lain akan dapat dan mudah mencontohnya, karena secara batin masyarakat lain mempunyai kepercayaan sikap dan perilaku kepada tokoh masyarakat yang demikian.

Pada masa sekarang ini mayoritas desa-desa di Indonesia sumber daya manusia tokoh masyarakatnya masih rendah, sehingga belum mampu mejadi pelopor (agen pembangunan) yang handal. Mereka ini harus ditingkatkan kemampuannya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan sehingga mempunyai pengetahuan dan teknologi yang dapat menggerakkan dan menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya, misalnya dalam pertanian, dll.

Selain dari itu sebagai upaya awal adalah sewaktu pemilihan dan penempatan tokoh-tokoh formal di pedesaan, betul-betul harus membuat persyaratan yang kolektif dan

memberikan jaminan gaji yang memadai, sehingga mereka dapat termotivasi untuk tinggal di pedesaan.

Misalnya untuk persyaratan pendidikan formal seorang kepala desa minimal tamat sarjana muda APDN atau sederajat. Seorang sarjana APDN ini, sebaiknya yang berasal dari masyarakat setempat, apakah melalui tugas belajar atau mereka yang belajar sendiri kemudian dikembalikan ke desanya. Diharapkan apabila tokoh-tokoh masyarakat yang demikian sebagai agen perubahan, atau agen pembangunan diharapkan mampu memimpin desanya. Dengan dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai diharapkan dapat mengelola (manajemen) seluruh potensi masyarakat yang ada.

Dan untuk pemerintah, perlu diingatkan bahwa sumber daya manusia Indonesia mempunyai kaitan dengan sampai sejauh mana mutu pendidikan formal dan informal yang ada. Secara tidak langsung kalau berbicara mutu pendidikan formal baik negeri atau swasta memang belum memadai (khusus di Riau). Dan ini secara langsung atau tidak langsung akan mempunyai hubungan kepada SDM masyarakat pedesaan kita.

Penulis berpendapat jika ingin sukses pembangunan di tempat kita, maka Pemerintah Daerah selain Pemerintah Pusat perlu memikirkan dan membantu terutama lembaga-lembaga perguruan tinggi swasta yang memang penyelenggaraannya murni swadaya masyarakat. Karena swadaya masyarakat, misalnya Universitas Islam Riau, tidak sedikit masyarakat yang tidak mempu untuk membiayai kuliah ditampung juga di UIR, dengan dasar karena UIR sebagai lembaga sosial dan tetap memegang prinsip semua Warga Negara Indonesia

berhak mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi.

Dalam masalah ini, UIR memang secara bertahap walaupun dengan kamampuan keuangan yang sangat terbatas, tetap komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia tenaga pengajar (dosen). Dan UIR menyadari betul bahwa faktor yang utama dalam meningkatkan kualitas mahasiswa (SDM), tidak lain adalah tingginya kualitas tenaga pengajar (dosen).

Di sinilah, perlunya peranan Pemerintah Daerah turut ambil bagian atau mau membantu secara bersama-sama untuk meningkatkan SDM tenaga pengajar dengan menyekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi (S2 dan S3) secara bertahap. Kemudian dengan kualitas dosen yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan SDM mahasiswa atau tamatan di Perguruan Tinggi, yang kemudian secara tidak langsung mereka ini berkualitas, diharapkan dapat memberikan sumbangan tenaga, pemikiran bagi pembangunan terutama di pedesaan, bahkan mereka ini diarahkan untuk kembali ke desa untuk membangun desa.

Dan akan terjawablah permasalahan kenapa sebahagian besar tenaga kerja yang ditampung di berbagai instansi pemerintah dan perusahaan di Riau hanya sebagian kecil tamatan perguruan tinggi di Riau?, memang masalah pokoknya tetap kualitas mereka yang kurang memadai (ini pengakuan Presiden Direktur RAPP pada kesempatan seminar ketenagakerjaan di UIR baru-baru ini).

Apa peranan DPRD?, jika DPRD menyadari dan komitmen sebagai wakil rakyat, maka mereka harus dan mau memperjuangkan anggaran pendidikan ini menjadi

mata anggaran yang cukup memadai di APBD. Penulis yakin betul bahwa persoalan keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, kurangnya kesempatan kerja, dll tidak dapat dilepaskan dari persoalan pendidikan manusia. Sebenarnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi (pendidikan formal) di berbagai daerah di Indonesia telah dilakukan cukup baik. Misalnya, di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Yogyakarta. Kita menyadari ada dampak positif dari pembangunan di sana.

Penulis merasa bangga dan terima kasih bahwa ada juga pihak swasta (PT. Caltec Fasific Indonesia) baru-baru ini menandatangani kontrak kerjasama membantu salah satunya untuk meningkatkan kualitas dosen dengan memberikan bantuan biaya pendidikan ke jenjang S-2 dan S-3 bagi dosen UIR ke dalam ataupun ke luar negeri.

Contoh yang kurang baik, kenapa misalnya niat UIR mendirikan Fakultas Kedokteran kurang mendapat sambutan yang hangat, dari beberapa pihak yang seharusnya membantunya?

2. Memfungsikan Semua Lembaga-lembaga yang Ada

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bagian terdahulu dalam tulisan ini, bahwa semua lembaga yang ada di pedesaan belum berfungsi secara maksimal, baik lembaga instansi terkait maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, khususnya pada kegiatan pembangunan pertanian dan perekonomian masyarakat. Konkretnya semua tokoh formal dan informal yang ada di masyarakat pedesaan harus mau dan mempu mengelola lahan pertanian, perkebunan,

perikanan (dalam batas ukuran tanah tertentu, misalnya untuk pertanian 100 x 100 M), industri kecil, kerajinan (dalam skala tertentu) dll.

Apabila ini berhasil maka diharapkan masyarakat lainnya akan mencontoh dan mengikutinya. Untuk menunjang keberhasilan ini perlu didukung oleh lembaga yang mengelola permodalan dan penyediaan bibit, racun pemberantas hama, peralatan pertanian, kebutuhan makanan sehari-hari para petani, sebagai tempat penampungan hasil-hasil pertanian, dll. Lembaga perekonomian ini untuk Negara kita yang menganut sistem ekonomi Pancasila, tidak lain adalah lembaga Koperasi Unit Desa (KUD).

Selama ini KUD sebagai nadi perekonomian pedesaan belum berjalan dengan baik. Persoalan yang sering terjadi adalah dalam hal menejemennya. Terkadang di tubuh KUD sering terjadi adanya konflik kepentingan pengurus secara pribadi dengan masyarakat. Karena KUD diharapkan sebagai pusat kegiatan perekonomian pedesaan, lembaga ini memang perlu dibenahi dari segi pengelolaan maupun permodalannya. Saya punya pemikiran, bahwa yang mengelola KUD sebaiknya komposisi pengurus antara pihak BRI unit desa dan sebagian anggota masyarakat yang dipilih. Dan pihak pengambilan keputusan harus dari pihak BRI.

Memang pemerintah khususnya BRI harus membuat program tersendiri dalam hal ini. mereka yang telah ditempatkan BRI selain mempunyai gaji tetap dari BRI juga mendapat gaji sebagai hasil keuntungan bersama dari KUD. Di harapkan sebagai pemegang tampuk pengambilan keputusan adalah orang-orang yang ditempatkan BRI ini yang kualitas SDM nya diharuskan orang-orang yang terpilih

dan mempunyai kemampuan manajemen dan semangat pengabdian yang tinggi.

KUD seperti inilah yang diharapkan mampu memberikan modal kepada petani, sebagai tempat petani membeli atau mengutang membeli peralatan pertanian, bibit, kebutuhan makanan sehari-hari, dan tempat menampung hasil-hasil pertanian. Selain KUD ini berfungsi sebagai simpan pinjam, KUD yang begini diharapkan dapat mendistribusikan atau menjual hasil-hasil pertanian untuk dikirim ke pasar lokal, nasional dan bahkan Internasional.

3. Membimbing dan Mengarahkan Masyarakat

Dalam hal ini tokoh formal dan informal di pedesaan setelah dibina oleh pemerintah yang punya tugas khusus dapat juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, baik melalui program KKN, dosen-dosen melalui desa binaan, juga oleh masyarakat lainnya yang mau menyumbangkan tenaga dan pemikiran bagi pembangunan masyarakat di pedesaan (sarjana yang baru selesai kemudian kembali ke kampung tempat asalnya).

Setelah mereka ini diberikan bimbingan dan pelatihan secara intensif di pedesaan dalam hal bagimana cara-cara berkebun, bertani dengan menerapkan pengetahuan dan teknologi, sehingga mendapat hasil atau produksi yang efisien dan berlipat ganda. Misalnya, termasuk juga dalam hal bagaimana memilih tanaman yang tepat yang sesuai dengan keadaan lahan tanah dan kondisi permintaan pasar. Dan perlu diingat, bahwa salah satu sikap dan prilaku masyarakat pedesaan adalah pola untuk selalu mengikuti dan mencontoh pola petani dari orang lain yang sudah pernah dan berhasil.

Momentum ini harus dapat dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di pedesaan yang harus terlebih dahulu melaksanakan gerakan berkebun, bertani dll. Apabila tokoh masyarakat ini berhasil maka yang lain akan mengikut. Jadi sasaran pembinaan utama dari pemerintah atau lembaga kelompok masyarakat lain yang ingin membangun desa pekerjaan yang utama adalah bagaimana cara kita membangkitkan semangat dan kamauan tokoh formal dan informal ini untuk terlebih dahulu berbuat dan mau berbuat, kemudian baru diikuti masyarakat yang lainnya dalam rangka meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian di pedesaan. Masalahnya memang cara-cara yang seperti ini relatif belum terlaksana dengan baik. contohnya: sarjana pertanian yang telah lulus dari perguruan tinggi cenderung untuk tetap tinggal di kota dan tidak mau kembali ke desa.

Jadi ada kesan kalau sudah sarjana untuk apa kembali lagi ke desa. Sesungguhnya menurut penulis sarjana yang baru lulus ini di kotapun tidak sedikit dari mereka hanya keluyuran, akibatnya mereka hanya menjadi penggangguran karena sulit memperoleh pekerjaan. Sesungguhnya di desanya (kampungnya) banyak lapangan kerja yang harus digarap yang juga bisa memberikan jaminan penghasilan yang berlipat ganda jika dibandingkan menjadi seorang pegawai negeri (dengan catatan menjadi petani sukses).

4. Membangun Infrastruktur dan Memberikan Kemudahan Bagi Para Investor Nasional dan Internasional

Dalam masalah ini memang perlu kerjasama dari berbagai instansi yang terkait dalam rangka membangun

masyarakat pedesaan. Banyak contoh-contoh yang dapat kita rasakan. Misalnya Pemerintah Daerah, Bappeda, BKPMD, PMA, Badan Pertanahan Nasional, Perizinan, dll instansi terkait bekerjasama, untuk mendorong investasi perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dari berbagai perusahaan swasta nasional ataupun internasional untuk mengolah sumber daya alam yang sebagian besar masih belum terjamah di pedesaan. Tentunya infrastruktur harus di bangun terlebih dahulu, fasilitas jalan, listrik, dll. Contoh: di Riau sebelum Jalan Sekijang Mati yang menembus Indragiri Hulu (Rengat) dibangun, maka masyarakat pedesaan di sana kondisinya tidaklah baik seperti kondisinya saat ini.

Ini tentunya berkat masukan investor yang saya kira mengembangkan Pola Perkebunan Inti Rakyat, misalnya RAPP atau Indosawit. Hanya saja pihak swasta ini sistemnya harus baik, jangan sampai penduduk masyarakat setempat ada yang tidak ditakutkan, artinya masyarakat setempat harus merasakan dampak positif masuknya investor kesana.

Pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan sarana jalan, listrik melalui Bappeda harus pula membantu mengalokasikan pembangunan sarana dan prasarana ke daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit terjangkau, baik sumbernya dari APBN ataupun APBD.

5. Mengarahkan Masyarakat Melakukan Kegiatan Pertanian Sesuai Kondisi Lahan dan Kondisi Permintaan Pasar.

Tidak jarang masyarakat pedesaan kurang memahami bagaimana bertani yang produktif dan efisien. Ini harus diakui karena kita menyadari masyarakat pedesaan kurang

pengetahuan dan teknologi pertaniannya. Melalui pembinaan kepada masyarakat formal dan informal dan akhirnya akan diikuti masyarakat lainnya di desa, melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, dll yang harus selalu produktif dan efisien harus selalu diterapkan. Misalnya pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, misalnya: tanah yang berawa tidak mungkin cocok untuk tanaman untuk daerah dataran tinggi. Termasuk disini iklim dan curah hujannya. Hal ini tidak lain supaya tidak terjadi pemborosan tenaga, biaya dalam mengolah pertanian.

Logikanya, tanaman akan subur dan berkembang dengan baik jika ditanam di tempat yang disukainya. Dan selain itu, diprioritaskan tanaman yang ditanam atau usaha yang dilakukan dalam kegiatan pertanian mengacu kepada permintaan pasar. Artinya jika suatu hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian seperti ini. Karena akan mengakibatkan menurunnya harga penjualan, karena menurut hukum pasar, apabila barang selalu tersedia sementara permintaan berkurang maka harga akan turun (atau sebaliknya). Jika harga produksi pertanian turun maka niscaya akan mempengaruhi tingkat pendapatan pertanian.

Selain itu juga para petani harus diarahkan menanam tanaman yang tumbal sulam, artinya ada kombinasi antara tanaman keras (perkebunan) dan tanaman palawija, pangan, tanaman hortikultura atau tanaman sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan petani sehari-hari, misalnya jagung,ubi, kacang-kacangan, buah-buahan, kunyit,

halia, lengkuas, tomat, cabe, dll sebagainya. Selain itu juga peternakan: ayam, itik, kambing, dll sebagainya.

C. Kesimpulan

Dari uraian kerangka pembahasan tersebut di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah melaksanakan pembangunan pada bidang :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat di pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Memfungsikan semua lembaga-lembaga yang ada termasuk instansi terkait yang bertugas sebagai agen pembangunan di pedesaan, terutama lembaga perekonomian rakyat, misalnya lembaga permodalan dan KUD;
3. Membimbing dan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif, serta memberikan contoh dalam kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan, dll dalam rangka menorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh petugas-petugas lapangan dari pemerintah (aparatur pemerintah, pejabat profesi, PPL, sarjana penggerak pembangunan, dll), pemuka masyarakat, beberapa anggota masyarakat yang sudah berhasil, Lembaga-lembaga sosial dan lembaga perguruan tinggi (melalui KKN atau PKL mahasiswa dari berbagai disiplin iptek);

4. Mendorong, membangun infrastruktur dan memberikan kemudahan bagi para investor nasional atau internasional untuk menanamkan investasi di pedesaan dengan melakukan sistem perkebunan inti rakyat (hubungan Bapak dengan anak angkat).
6. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan (tanaman yang sesuai dengan struktur tanah) dan kondisi permintaan pasar. Sehingga dalam kegiatan pertanian tercapai efisiensi dalam mengolah pertanian atau mencegah pengorbanan yang terlalu besar untuk memperoleh hasil maksimal.

D. Daftar Kepustakaan

Bintoro Tjokroamidjojo, dkk. 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakart.

Coralie Bryant, dkk. 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Kusnaedi. 1995. Membangun Desa. Swadaya. Jakarta.

Sondang. P.Siagian. 1985. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Gunung Agung. Jakarta.

Taliziduhu Ndaraha. 1986. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta.

Yovita Hetty Indriani. 1993. Pemilihan Tanaman dan Lahan Sesuai Kondisi Lingkungan dan Pasar. Swadaya. Jakarta.

Forum Pengkajian Seskoad. 1994. Bunga Rampai. Dephankam. Jakarta.


PONPES MODERN SYECH WALID THAIB SALEH INDRAGIRI

BAB IV

ANALISIS POTENSI ALAM SEBAGAI LANDASAN PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN TERPADU DI PEDESAAN

A. Pendahuluan

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, ekonomi, pertanian, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.

Demikian pula dalam kerangka acuan pembangunan nasional, pembangunan pertanian terpadu di pedesaan sangat strategis. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, selain itu memiliki potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.

Konsep pembangunan pertanian terpadu dengan pendekatan strategis dapat dijelaskan dari empat elemen dasar, sebagaimana yang dikemukakan sufian (2002 : 351-352) yaitu : pengamatan atau analisis potensi alam dan

sosial, perumusan strategi, implementasi strategi dan hasil yang dicapai sekaligus dijadikan bahan pengamatan atau analisis potensi alam dan sosial dalam penyusunan strategi pembangunan pertanian terpadu selanjutnya. Demikian proses ini berlangsung terus secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam realitas pembangunan dewasa ini tidak jarang dijumpai proses pembangunan terpadu dipedesaan, kurang dilandaskan kepada pengamatan atau analisis potensi alam dan sosial di pedesaan, yang pada akhirnya hasil pembangunan pertanian belum optimal. Atas dasar itu penelitian ini sangat relevan apabila dikaitan dengan pentingnya elemen dasar analisis potensi alam sebagai landasan perumusan strategi pembangunan pertanian terpadu di pedesaan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi alam sebagai landasan perumusan strategi pembangunan pertanian terpadu di pedesaan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam perumusan strategi pembangunan pertanian terpadu di pedesaan.

C. Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada sembilan desa di Provinsi Riau dengan metode survei, yakni desa : Teratak Buluh (Kabupaten Kampar), Kampar (Kabupaten Kampar), Pangkalan Kerinci (Kabupaten Pelalawan), Lubuk Gaung (Kota Dumai), Pulau Burung (Kabupaten INHIL), Meskom (Kabupaten Bengkalis), Buru (Kabupaten Karimun), Nongsa

(Kota Batam) dan Panggak Laut (Kabupaten KEPRI). Penelitian dilaksanakan selama lebih kurang satu tahun (September 2000- Oktober 2001).

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan cara mengumpulkan dari literatur, dokumen, arsip dan laporan tahunan yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari penelitian ini diedit dan disusun dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis potensi alam. Analisis kualitatif digunakan untuk analisis perumusan strategi pembangunan pertanian terpadu di pedesaan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Potensi Alam Pedesaan

Potensi alam Desa / Kelurahan penelitian digambarkan oleh komponen-komponen : luas wilayah (Km2) dan jenis penggunaan tanah (Ha); keadaan tanah, iklim dan curah hujan; jarak lurus dan orbitasi atas pengaruh pusat fasilitas ibu kota Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi yang terdekat (Km); dan daya dukung wilayah.

Agar diperoleh dinamikanya, deskripsi tingkat potensinya (0-20 %, 21-40 %, 41-60 %, 61-80 %, 81-100 %) akan dinyatakan sama dengan nilai (skor 1, 2, 3, 4, dan 5). Berdasarkan keempat komponen itu dapat pula ditentukan tingkat potensi Desa / Kelurahan (dengan kategori penilaian: sangat kurang berpotensi, kurang berpotensi, cukup berpotensi, berpotensi dan sangat berpotensi. Kesemuanya

itu diukur dari tingkat pemanfaatan lahan, kesesuain usaha tani, dan kedekatan dengan pusat kota sebagai pasar strategis.

Dinamika luas wilayah (Km2) dan jenis penggunaan tanah (Ha) menggambarkan keadaan geografis ruang kehidupan dan pemanfaatan lahan, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Luas Wilayah (Km2) dan Jenis Penggunaan Tanah (Ha)

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Jenis Penggunaan Tanah (Ha)						Skor
			Lahan Sawah	Lahan Kering	Bngn./ Pkr.	Hutan Negara	Lain-Lain	Jumlah	
01	Teratak Buluh	198,37	15	6.924	1.014	0	11.884	19.837	3
02	Kampar	29,14	598	599	135	173	1.409	2.914	4
03	Pangkalan Kerinci	108,00	0	8.790	660	0	1.350	10.800	5
04	Lubuk Gaung	210,44	670	2.500	170	1.265	16.439	21.044	1
05	Pulau Burung	195,09	0	15.165	384	0	3.960	19.509	4
06	Meskom	54,00	0	1.346	165	3.882	7	5.400	2
07	Buru	131,00	0	1.080	250	300	11.470	13.100	1
08	Nongsa	15,00	0	453	76	907	64	1.500	2
09	Panggak Laut	60,28	0	2.310	21	283	3.414	6.028	3
	Jumlah	**1001,32**	**1.283**	**39.167**	**2.875**	**6.810**	**49.997**	**100.132**	-

Sumber : *MANTIS Kecamatan, Desa Sampel, 2000 (Diolah Kembali).*

Keadaan tanah, iklim dan curah hujan menggambarkan kesuburan tanah yang dijadikan tolak ukur jenis usaha yang lebih sesuai dengan potensi alam. Keadaannya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Keadaan Tanah, Iklim dan Curah Hujan

No	Desa/ Kelurahan	Bentang Lahan	Jenis Tanah	Ketinggian	Iklim	Curah Hujan (mm)/ th	Suhu Rata (°C)	Skr
01	Teratak Buluh	Dataran Tinggi Rendah, Rawa, Sungai	Organosal, Pedsolik Merah	10m	Tropis Basah	2460,0	27,6	4
02	Kampar	Dataran Tinggi, Rendah, Rawa, Sungai	Kuning Organosal,	15m	Tropis Basah	2494,0	27,0	5
03	Pangkalan Kerinci	Dataran Tinggi, Rendah, Rawa, Sungai	Pedsolik Merah Kuning	8 m	Tropis Basah	2308,0	27,8	4
04	Lubuk Gaung	Dataran Rendah, Rawa, Pantai, Laut	Organosal, Pedsolik Merah Kuning	2 m	Tropis Basah	1924,3	28,0	3
05	Pulau Burung	Dataran Rendah, Rawa, Pantai, Laut	Organosal, Pedsolik Merah Kuning	2 m	Tropis Basah	1613,0	28,5	3
06	Meskom	Dataran Rendah, Rawa, Pantai, Laut	Organosal, Gambut	2 m	Tropis Basah	1360,4	29,0	1
07	Buru	Dataran Rendah, Rawa, Pantai, Laut	Organosal Organosal,	2 m	Tropis Basah	2200,0	28,0	2
08	Nongsa	Dataran Tinggi, Rendah, Pantai, Laut	Pedsolik Merah Kuning	25m	Tropis Basah	2416,0	27,0	2
09	Panggak Laut	Dataran Rendah, Rawa, Pantai, Laut	Organosal, Pedsolik Merah Kuning Organosal	2 m	Tropis Basah	2379,0	27,0	1

Sumber: *MANTIS Kecamatan & Monografi, Desa Sampel,2000 (Diolah Kembali).*

Jarak lurus dan orbitasi atas pengaruh pusat fasilitas ibu kota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terdekat (Km) menggambarkan kemudahan-kemudahan dan akses pelayanan dari pusat fasilitas Kota, pada tabel 3.

Tabel 3.

Jarak Lurus dan Orbitasi Atas Pengaruh Pusat Fasilitas Ibu Kota yang Terdekat (Km)

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan yang Terdekat (km)	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten yang Terdekat (km)	Jarak ke Ibu Kota Provinsi yang Terdekat (km)	Skor
01	Teratak Buluh	Bukit Raya, 10 km	Pekanbaru, 20 km	Pekanbaru, 20 km	4
02	Kampar	Air Tiris, 5 km	Bangkinang,17 km	Pekanbaru, 33 km	3
03	Pangkalan Kerinci	Langgam, 20 km	Pkln. Kerinci, 1 km	Pekanbaru, 70 km	5
04	Lubuk Gaung	Bukit Kapur, 38 km	Dumai, 48 km	Pekanbaru, 233 km	2
05	Pulau Burung	P. Burung, 1 km	Tembilahan,197 km	Pekanbaru, 410 km	3
06	Meskom	Bengkalis, 20 km	Bengkalis, 20 km	Pekanbaru, 151 km	1
07	Buru	Buru, 1 km	T.B.Karimun,22km	Pekanbaru, 230 km	2
08	Nongsa	Nongsa, 1 km	Batam, 45 km	Pekanbaru, 332 km	4
09	Panggak Laut	Daik, 4 km	Tj. Pinang, 151 km	Jambi, 154 km; Pekanbaru, 492 km	1

Sumber : *MANTIS Kecamatan, Desa Sampel, 2000 (Diolah Kembali).*

Daya dukung wilayah menggambarkan kesesuaian karakteristik usaha dengan potensi alam dan letak strategis Desa dapat berpengaruh terhadap tingkat potensi desa, hal itu dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Daya Dukung Wilayah

No	Desa/ Kelurahan	Karakteristik Usaha Desa	Letak Strategis Desa	Skr
01	Teratak Buluh	Jasa dan Perdagangan	Desa Lintasan & Interland antara Kota Provinsi dengan Kota Kabupaten	4
02	Kampar	Pertanian & Persawahan	Desa Lintasan antara Kota Provinsi dengan Kota Kabupaten	3
03	Pangkalan Kerinci	Industri Pabrik Kertas (HTI) & Perkebunan Sawit	Desa Lintasan dan Interland antara Kota Kabupaten dengan Kota Provinsi	5
04	Lubuk Gaung	Pertanian & Perladangan	Kelurahan Interland Kota Dumai	1
05	Pulau Burung	Industri Perkebunan Kelapa	Desa Interland Kota Kecamatan	4
06	Meskom	Perikanan Laut	Desa Interland Kota Kabupaten	2
07	Buru	Peternakan & Perikanan Laut	Desa Lintasan antara Kota Kabupaten dengan Kota	2
08	Nongsa	Pariwisata & Perikanan Laut	Kecamatan	3
09	Panggak Laut	Industri Rumah Tangga dan Perikanan Laut	Kelurahan Interland Kota Batam Desa Interland Kota Kecamatan	1

Sumber : *Monografi dan Profil, Desa Sampel, 2000 (Diolah Kembali).*

Ternyata hasil rekapitulasi nilai skor tiap komponen potensi alam pedesaan penelitian sebagaimana disajikan pada tabel 5.

Tabel 5.
Tingkat Potensi Alam Pedesaan/ Kelurahan Penelitian

No	Jenis Potensi	Skor Tingkat Potensi Desa / Kelurahan								
		Teratak Buluh	Kam-par	Pangkalan Kerinci	Lubuk Gaung	Pulau Burung	Mes-kom	Buru	Non-gsa	Pang-gak Laut
01.	LW & JPT	3	4	5	1	4	2	1	2	3
02.	KTI & CH	4	5	4	3	3	1	2	2	1
03.	JLDKK/K & PT	4	3	5	2	3	1	2	4	1
04.	DDW	4	3	5	1	4	2	2	3	1
	Rata-rata Skor	3,8	3,8	4,8	1,8	3,5	1,5	1,8	2,8	1,5
	%	76	76	96	36	71	30	36	56	30

Sumber : *Data sekunder (diolah kembali) 2001*

Keterangan :

- LW & JPT = Luas Wilayah dan Jenis Penggunaan Tanah
- KTI & CH =Keadaan tanah, Iklim dan Curah Hujan
- JLKK/K & PT =Jarak Lurus Dengan Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Terdekat
- DDW =Daya Dukung Wilayah

Dengan demikian, tabel 5 tersebut memberikan gambaran bahwa desa yang sangat berpotensi yaitu desa Pangkalan Kerinci, terutama sebagai lokasi pemasaran produk pertanian yang sangat strategis sebagai pusat kota Kabupaten, disamping itu memiliki daya dukung wilayah karena memiliki fasilitas umum yang baik. Selain dari itu memiliki luas wilayah yang sangat potensi untuk dikembangkan terutama perkebunan, tanaman pangan dan sayur-sayuran, karena memiliki iklim tropis basah, dengan kondisi tanah organosal, pedsolik merah kuning. Usaha yang menjadi prioritas adalah industri dan perdagangan.

Teratak Buluh merupakan desa berpotensi. Selain memiliki luas wilayah dan kondisi tanah yang berpotensi untuk pertanian. Beriklim tropis basah dan memiliki jenis tanah organosal, pedsolik merah kuning. Juga sebagai lokasi pemasaran produk pertanian yang sangat strategis sebagai pusat kota Kabupaten, disamping itu memiliki daya dukung wilayah karena memiliki fasilitas umum yang baik. Usaha yang menjadi prioritas perdagangan dan jasa, peternakan dan perikanan darat.

Desa Kampar, alamnya juga berpotensi terutama keadaan tanah, beriklim tropis basah dan curah hujan 2494,0 mm/

tahun. Memiliki tradisi pertanian yang disesuaikan dengan kondisi tanah perkebunan, tanaman pangan dan sayur-sayuran. Memiliki daya dukung milayah dan dekat dengan pusat pemasaran serta terletak antara Pekanbaru dengan Kampar. Usaha yang menjadi prioritas pertanian, peternakan dan perikanan darat.

Desa Pulau Burung merupakan desa yang berpotensi untuk kegiatan industri perkebunan. Memiliki lahan yang cukup luas, dekat pasar internasional untuk komoditi ekspor terutama Singapura dan Malaysia. Demikian pula untuk usaha perikanan laut dan peternakan, karena memiliki daya dukung wilayah dan beriklim tropis basah.

Kelurahan Nongsa cukup berpotensi untuk pertanian, namun sangat berpotensi sebagai industri pariwisata. Nongsa merupakan Kelurahan yang memiliki alam dan pasar yang mendukung industri pariwisata yaitu Singapura.

Desa Buru dan Lubuk Gaung cukup berpotensi untuk kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan laut. Masing-masingnya terletak dekat kota kabupaten sebagai pasar satrategis, selain itu memiliki luas pantai dan laut yang berpotensi pengembangan penangkapan ikat laut.

2. Tingkat Perkembangan Pertanian Pedesaan Penelitian

Dari keadaan potensi alam desa/kelurahan penelitian menggambarkan tingkat perkembangan pertanian yang dilihat dari komponen : luas tanaman pangan (Ha), luas tanaman perkebunan (Ha), jumlah ternak (ekor) dan produksi ikan (ton/tahun).

Agar diperoleh dinamikanya, deskripsi tingkat perkembangan pertanian (0-20 %, 21-40 %, 41-60 %, 61-80

%, 81-100 %) akan dinyatakan sama dengan nilai (skor 1, 2, 3, 4, dan 5). Berdasarkan keempat komponen itu dapat pula ditentukan tingkat perkembangan pertanian Desa / Kelurahan (dengan kategori penilaian : sangat kurang berkembang, kurang berkembang, cukup berkembang, berkembang dan sangat berkembang.

Kesemuanya itu diukur dengan perbandingan "*man-land-ratio*" (perbandingan jumlah penduduk dengan luas pertanian rakyat : jumlah orang tiap hektar lahan pertanian) dan perbandingan "*man-product-ratio*" (perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah produksi hasil pertanian ton/ tahun yang dihasilkan setiap petani).

Luas tanaman pangan (Ha) menggambarkan tingkat perkembangan pertanian tanaman pangan Desa-desa penelitian (berapa % Desa dari sembilan Desa yang telah mengusahakan dan berapa luasnya/Ha tanaman pangan setiap petani). Padi 33 % skor 2; jagung 44 % skor 3; ubi kayu 89 % skor 5, ubi jalar 33 % skor 2; kacang tanah 22 % skor 2; kacang kedelai 33 % skor 2; kacang hijau 11 % skor 1; jumlah skor = 17 : 7 = 2,4; dengan demikian skor 2, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.
Luas Tanaman Pangan (Ha)

No	Desa/ Kelurahan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kc. Tanah	Ke-delai	Kc. Hijau	Jlh	Skor
01	Teratak Buluh	15,00	4,50	14,25	1,50	5,25	0,50	1,00	42,00	3
02	Kampar	598,00	0,10	1,90	0	0,70	0	0	600,70	5
03	Pangkalan Kerinci	0	1,00	2,00	0	0	0	0	3,00	1
04	Lubuk Gaung	670,00	475,00	0	43,00	0	100,00	0	770,00	4
05	Pulau Burung	0	0	39,00	2,00	0	91,00	0	648,00	4
06	Meskom	0	0	6,00	0	0	0	0	8,00	3
07	Buru	0	0	1,00	0	0	0	0	1,00	2
08	Nongsa	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	2
09	Panggak Laut	0	0	1,00	0	0	0	0	1,00	1
	JUMLAH	1283,00	480,60	67,15	46,50	5,95	191,50	1,00	2075,70	-
	Skor	2								

Sumber: *MANTIS Kecamatan dan Monografi, Desa Sampel, 2000 (Diolah Kembali).*

Luas tanaman perkebunan (Ha) menggambarkan tingkat perkembangan perkebunan Desa-desa penelitian (berapa % Desa dari sembilan Desa yang telah mengusahakan perkebunan dan berapa luasnya/Ha perkebunan setiap petani). Kelapa bulat 100 % skor 5; kelapa sawit 11 % skor 1; karet 44 % skor 3, sagu 22 % skor 2; hartikutura 100 % skor 5; lain-lain 100 % skor 5; jumlah skor = 21 : 6 = 3,5; dengan demikian skor 3, sebagaimana dapat dilihat pada tebel 7.

Tabel 7.
Luas Tanaman Perkebunan (Ha)

No	Desa/ Kelurahan	Kelapa Bulat	Kelapa Sawit	Karet	Sagu	Hartikultura	Lain-lain	Jumlah	Skor
01	Teratak Buluh	27	0	147	0	69	249	492	1
02	Kampar	23	0	92	0	43	189	344	3
03	Pangkalan Kerinci	15	4500	114	0	39	254	4922	3
04	Lubuk Gaung	70	0	0	0	42	271	383	1
05	Pulau Burung	14165	0	0	0	157	357	14678	5
06	Meskom	8	0	738	0	32	152	930	4
07	Buru	25	0	0	27	36	185	273	2
08	Nongsa	5	0	0	0	5	113	123	2
09	Panggak Laut	5	0	0	1900	4	118	2027	4
	JUMLAH	**14343**	**4500**	**1091**	**1927**	**427**	**1885**	**24172**	-
	Skor	3							

Sumber : *MANTIS Kecamatan dan Profil, Desa Sampel, 2000 (Diolah Kembali).*

Jumlah ternak (ekor) menggambarkan tingkat perkembangan peternakan Desa-desa penelitian (berapa % Desa dari sembilan Desa yang telah mengusahakan peternakan dan berapa jumlahnya/ekor setiap peternak). Sapi 78 %, skor 4; kerbau 56 % skor 3; kambing 100 % skor 5; babi 11 % skor 1; ayam ras 56 % skor 3; ayam buras 100 % skor 5; itek/bebek 100 % skor 5; jumlah skor = 26 : 7 =3,7; skor 3, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Jumlah Ternak (Ekor)

No	Desa/ Kelurahan	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Ras	Ayam Buras	Itik/ Bebek	Jumlah	Skor
01	Teratak Buluh	14	232	247	0	15000	1671	112	1727	3
02	Kampar	15	116	57	0	1500	3812	96	559	4
03	Pangkalan Kerinci	150	0	160	0	1842	5367	175	769	2
04	Lubuk Gaung	360	3	610	115	200	27000	350	2863	4
05	Pulau Burung	32	0	43	0	0	2003	13	209	1
06	Meskom	700	17	560	0	0	3800	125	520	3
07	Buru	0	0	100	0	20000	1350	15000	3645	5
08	Nongsa	0	0	15	0	0	325	25	36	1
09	Panggak Laut	17	4	108	0	0	1758	845	273	2
	JUMLAH	**1288**	**372**	**1900**	**115**	**38542**	**47086**	**16741**	**106044**	-
	Skor	3								

Sumber : *MANTIS Kecamatan dan Profil, Desa Sampel, 2000 (Diolah Kembali).*

Jumlah produksi ikan (ton/tahun) menggambarkan tingkat perkembangan usaha budi daya atau tangkapan ikan Desa-desa penelitian (perbandingan jumlah rumah tangga dengan jumlah produksi ikan ton/tahun setiap petani/ nelayan). Penghasilan petani atau nelayan ikan yang sangat baik ≥ 5 kg ikan x Rp 10.000,-/kg/hari atau setara dengan penghasilan ≥ Rp 50.000,- sama dengan skor 5. Jumlah produksi ikan Desa-desa penelitian 3397 ton/tahun : 11451 kk = 0,297 ton/th = 0,83 kg/hari/kk berada pada interval skor 1, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9.
Produksi Ikan (ton/tahun)

No	Desa/Kelurahan	Ikan Laut	Ikan Darat	Jumlah	Skor
01	Teratak Buluh	0	132	132	2
02	Kampar	0	108	108	1
03	Pangkalan Kerinci	0	191	191	3
04	Lubuk Gaung	306	0	306	3
05	Pulau Burung	794	0	794	4
06	Meskom	893	0	893	5
07	Buru	813	0	813	4
08	Nongsa	121	0	121	2
09	Panggak Laut	39	0	39	1
	Jumlah	**2966**	**431**	**3397**	-
	Skor	**1**			

Sumber : *MANTIS Kecamatan, Desa Sampel, 2000 (Diolah Kembali).*

Ternyata hasil rekapitulasi nilai skor tiap komponen perkembangan pertanian pedesaan penelitian sebagaimana disajikan pada tabel 10.

Tabel 10.
Tingkat Perkembangan Pertanian Pedesaan/ Kelurahan Penelitian

No	Jenis Pertanian	Skor Tingkat Perkembangan Pertanian Desa / Kelurahan								
		Teratak Buluh	Kam-par	Pangkalan Kerinci	Lubuk Gaung	Pulau Burung	Meskom	Buru	Nong-sa	Panggak Laut
01.	LTPN	3	5	1	4	4	3	2	2	1
02.	LTPK	1	3	3	1	5	4	2	2	4
03.	JT	3	4	2	4	1	3	5	1	2
04.	PI	2	1	1	3	4	5	4	3	2
	Rata-rata Skor	**2,3**	**3,3**	**1,8**	**3,0**	**3,5**	**3,8**	**3,3**	**2,0**	**2,2**
	%	**46**	**66**	**36**	**60**	**70**	**76**	**66**	**40**	**44**

Sumber : *Data sekunder (diolah kembali) 2001*

Keterangan :

- LTPN = Luas Tanaman Pangan
- LTPK = Luas Tanaman Perkebunan
- JT = Jumlah Ternak
- PI = Produksi Ikan

Dari tabel 10 tersebut menggambarkan bahwa desa yang sudah sangat berkembang pertaniannya adalah desa Meskom. Kegiatan usaha yang sangat menonjol adalah penangkapan ikan laut. Sedangkan usaha yang berpotensi dan perlu ditingkatkan adalah perkebunan, tanaman pangan, sayur-sayuran dan ternak. Peluang pemasaran hasil pertanian sangat strategis karena desa ini dekat dengan kota bengkalis sebagai ibu kota Kabupaten dan dapat memanfatkan perdagangan lintas batas dengan Malaysia. Secara umum semua usaha sudah berkembang kecuali peternakan dan tanaman pangan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Desa Pulau Burung kegiatan pertanian yang sangat menonjol adalah perkebunan kelapa. Usaha yang berpotensi untuk ditingkatkan adalah tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan dan perikanan laut. Sedangkan usaha yang berpotensi tetapi masih minim terutama usaha perikanan laut.

Buru merupakan desa yang pernah sukses sebagai desa peternakan bebek dan penangkapan ikan laut. Namun saat ini usaha peternakan sudah berkurang karena faktor permodalan. Usaha yang masih bertahan adalah penangkapan ikan laut. Sebenarnya semua usaha pertanian desa ini sangat berpotensi, baik dilihat kondisi lahan maupun aspek pemasaran karena dekat dengan kota Tanjung Balai Karimun dan Batam serta

pasar internasional Malaysia dan Singapura. Sedangkan usaha yang sangat berpotensi tetapi belum dikembangkan adalah perkebunan, tanaman pangan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Desa Kampar merupakan desa yang didominasi tanaman pangan, ternak dan perkebunan. Usaha yang belum begitu dikembangkan namun sebenarnya sangat prospek adalah sayur-sayuran, buah-buahan dan perikanan darat, selain meningkatkan usaha yang sudah ada terutama tanaman pangan, perkebunan dan peterbnakan. Pasar yang sangat strategis selain Air Tiris, Pekanbaru juga Bangkinang. Faktor hambatan adalah modal, teknologi, kemampuan petani dan manajemen usaha tani.

Lubuk Gaung merupakan desa yang berpotensi untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan penangkapan ikan laut. Tanaman pangan yang sangat menonjol adalah padi dengan cara berladang dan musiman. Meskipun memiliki cadangan lahan perkebunan sawit, namun belum ada investor yang menanamkan modalnya. Usaha penagkapan ikan laut meskipun berpotensi tetapi tradisi masyarakat sebagai nelayan sangat kurang. Sebagai daerah pinggiran (*interland*) dari kota Dumai yang mayoritas daerah industri dan pelabuhan, Lubuk Gaung semakin terdesak menjadi daerah cadangan lokasi perindustrian.

Teratak Buluh pada dasarnya merupakan desa yang usahanya jasa dan perdagangan serta industri perkayuan. Kegiatan pertanian yang sedikit menonjol adalah peternakan dan tanaman pangan. Potensi yang dapat dikembangkan adalah perikanan sungai (kerambah) dan kolam. Selain itu tanaman pangan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Desa Panggak Laut merupakan desa perkebunan sagu, namun kurang peningkatan. Potensi yang sangatn menonjol sebenarnya penagkapan ikan laut, namun juga kurang dikembangkan. Panggak Laut termasuk desa yang sangat miskin, meskipun sebenarnya alamnya berpotensi untuk dikembangkan terutama perikanan laut. Persoalannya terletak pada modal, kemampuan petani, teknologi dan manajemen usaha tani. Pemasaran memang agak sulit, kecuali ada Koperasi yang mampu menampung hasil pertanian dan membawanya ke Tanjung Pinang atau ke Jambi.

Nongsa merupakan desa pinggiran dari pusat indutri kota batam. Kegiatan usaha masyarakat yang sangat menonjol adalah nelayan. Usaha lain yang sangat menonjo adalah sebagai lokasi pariwisata, namun masyarakat lokal kurang mendapat peranan. Perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan sangat minim. Sebenarnya potensi alam terutama pariwisata sangat menjanjikan, demikian pula sayur-sayuran, perikanan, dan peternakan, mengingat pasar lokal (Batam) dan pasar internasional (Singapura) berhadapan langsung, namun kebijakan pemerintah dan Otorita Batam kurang memberi perhatian kepada masyarakat lokal.

E. Kesimpulan dan Saran

Ternyata hasil rekapitulasi nilai skor tiap komponen sebagaimana disajikan pada tabel IV. 33, untuk rata-rata Desa / Kelurahan penelitian adalah 13,78 : 5 = 2,76; jadi secara keseluruhan tingkat perkembangan bidang pembangunan Desa / Kelurahan penelitian termasuk kategori kurang baik. Sedangkan tingkat perkembangan masing-masing bidang

pembangunan Desa / Kelurahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bidang pembangunan sumber daya manusia Desa/ Kelurahan, skor 3,10 = 62 % , kategori cukup baik;
2. Bidang pembangunan pertanian Desa / Kelurahan , skor 2,25 = 45 %, kategori kurang baik;
3. Bidang pembangunan perekonomian Desa/ Kelurahan , skor 3,33 = 67 %, kategori cukup baik;
4. Bidang pembangunan fasilitas umum Desa/ Kelurahan , skor 3,43 = 69 %, kategori cukup baik;
5. Bidang pembangunan pendapatan Desa / Kelurahan, skor 2 = 40 %, kategori kurang baik.

F. Daftar Kepustakaan

Bintoro Tjokroamidjojo, dkk. 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakart.

Coralie Bryant, dkk. 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Kusnaedi. 1995. Membangun Desa. Swadaya. Jakarta.

Sondang. P.Siagian. 1985. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Gunung Agung. Jakarta.

Taliziduhu Ndaraha. 1986. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta.

Yovita Hetty Indriani. 1993. Pemilihan Tanaman dan Lahan Sesuai Kondisi Lingkungan dan Pasar. Swadaya. Jakarta.

Forum Pengkajian Seskoad. 1994. Bunga Rampai. Dephankam. Jakarta.


المعهد الإسلامي العصري دار المتقين
PONPES MODERN DAARUL MUTTAQIEN TEMBILAHAN

BAB V

PERENCANAAN STRATEGIS DAN TERPINGGIRNYA MASYARAKAT SETEMPAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI RIAU

A. Pendahuluan

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat untuk menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-sptiual, meliputi bidang: ideologi, politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.

Demikian pula dalam kerangka acuan pembangunan nasional, pembangunan yang memberdayakan masyarakat dipedesaan harus menjadi pusat perhatian dan tanggungjawab bersama. Membangun masyarakat pedesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Selain memiliki sumber daya manusia, pedesaan juga memiliki sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan Indonesia harus menjadi pusat perhatian yang lebih serius, terencana, terpadu dan berkesinambungan, serta dipercepat prosesnya sebagaimana

telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 sebagai TAP MPR No. IV/MPR/1999 (huruf G angka 1. d), bahwa perlu percepatan pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan program prasarana, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.

B. Perkembangan Otonomi Desa

Mencermati perkembangan pembangunan pedesaan, sejak awal masa kemerdekaan sampai pertengahan tahun enampuluhan, otonomi desa terus berkembang. Namun sejak masa Orde Baru, terjadi perubahan yang oleh Hansen (1981:178) disebut sebagai masa memudarnya otonomi desa dan mengetatnya kontrol pemerintah pusat atas daerah pedesaan. Sejak itu semakin jelas dan terstruktural, secara berangsur profil pedesaan hanya sebagai pelaksana instruksi pihak atas semata-mata. Ndraha (1990:157) menyatakan, dahulu otonomi desa merupakan otonomi yang tumbuh bersamaan denbgan tumbuhnya masyarakat berdasaarkan hukum adat dan tradisi, kini otonomi itu merupakan pemberian dari atas (pemerintah pusat). Dengan demikian sudah barang tentu tidak mendorong berkembangnya inisiatif dan prakarsa masayarakat pedesaan.

Pada tahap perkembangan berikutnya pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan terakhir pada Orde Refoprmasi dipertegas lagi melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun sebagaimana dinyatakan

Ndraha (1990:158) konsep ekonomi yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 1979 tersebut dalam kenyataannya belum terealisasi dengan baik, karena pemerintahan pada masa Orde Baru terlalu sentalistis. Bryant dan White (1982:369) menyatakan pula, apabila konsep otonomi desa dapat dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang cukup besar kepada keberasilan pembanguan pedesaan. Pendapat tersebut dapat dipahami, karena hakekat otonomi adalah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat pedesaan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan (pasal 1 huruf o, UU No, 22 tahun 1999). Apabila pemerintahan yang berotonomi ini tidak dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik, maka menurut Rusadi (1988:176) akakn menimbulkan krisis partispafsi dari masyarakat.

Berkaitan dengan otonomi desa dalam perspektif kontekstual, pendekatan pembangunan yang berpihak kepada rakyat tidak dapat diabaikan. Demikian pula halnya dalam upaya penerapan inovasi dan teknologi di pedesaan, membutuhkan suatu strategi adaptasi antara modenisasi dan tradisi. Oleh sebab itu pendekatan pembangunan selama ini dirsakan masyarakat kurang tepat, sebagaimana dinyatakan Kartasasmita (1966:50) bahwa hasil pembangunan yang dinikmati masyrakat sampai lapisan terbawah (*trickle-down effect)* yang melekat pada paradigma pertumbuhan *(growth paradigm)* ternyata tidak terwujud bahkan yang terjadi justru kesenjangan semakin lebar.

C. Perencaan Pembangunan Pedesaan dan Dampaknya di Riau

Pelaksaaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan potensi yang ada di pedesaan, tentunya tidak efisien, mengingat pada kenyataanya pedesaan di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik antara satu desa dengan desa yang lain (Saefullah, 1995:13). Karena itu, menurut Findley (1987:19) keberhasilan pembangunan pedesaan sangat ditentukan pula bagaimana terciptanya kesesuaian antara perencanaan pembangunan yang dibuat dengan potensi yang ada, kebutuhan dan keinginan masyarakat di pedesaan. Bryant dan White (1989:378) menyatakan pendekatan pembangunan yang demikian membutuhkan suatu strategi pola keterpaduan dari bawah ke atas *(down up strategic)* dengan dari atas ke bawah *(top down strategic)*, tentunya dengan memberikan porsi yang lebih besar pada perencanaan dari bawah keatas *(boottom up planning)* karena dianggap lebih sesuai dengan semangat pemerintahan desentralisasi dalam rangka pemberian kewenangan yang lebih luas untuk melaksanakan otonomi terutama pada daerah tingkat II (Budiharsono, 1989:30).

Pada awalnya, Lembaga Sosial Desa (LSD) merupakan lembaga masyarakat yang tumbuh dari bawah dan dapat mengemban fungsinya sebagai pembimbing dan penyuluh berbagai pekerjaan sosial desa, dan mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat desa. Kemudian, melalui KEPPRES No. 28 tahun 1980, LSD diubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala Desa karena jabatannya, merangkap fungsi ketua umum LKMD. Sesunguhnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya LKMD merupakan lembaga yang

sangat strategis, sebagai perangkat perencana dan pelaksanaan pembangunan pedesaan dan membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan, menggerakkan partisipasi dan mendorong kegotongroyongan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, menurut Ndraha (1990:157) LKMD kurang berfungsi, karena lebih besar pengaruh dan peranan kepala desa dalam proses pengambilan keputusan. Kenyataan ini terjadi lebih-lebih karena kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan pencapaian target, formalitas, keserempakan, keseragaman, dan sifat massal.

Dalam kaitan organisasi perencanaan pembangunan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 dan PMDN N0. 9 tahun 1982, mensyaratkan agar perencanaan pembangunan diawali dari lapisan terbawah di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukkan Bryant dan White (1989:380) bahwa mengingat sifat hakikat pembangunan dalam jangka panjang dan juga kenyataan pembangunan mencakup kapasitas dan pemerataan serta penumbuhan kekuasaan, perhatian pada strategi dari bawah sekurng-kurangnya akan sekaligus mendorong pemerataan dan efisiensi. Friedmann (1981:42) menyatakan bahwa pembangunan desa (rural development) meskipun dibimbing secara sentral tetapi harus dilandaskan pada kondisi setempat, Findley (Saefullah, 1995:13) memberi ketegasan pula bahwa untuk memahami perilaku individu perlu dipertimbangkan setting kelompok dan lingkungan dimana individu itu berada. Karena itu, dalam kaitan perencanan pembangunan yang efektif dan efisien menuntut peran yang lebih besar diberikan pada organisasi lokal. Sedangkan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya

diharapkan hanya sebagai fasilitator dan memberi bimbingan. Esman dan Uphoff (1982:9) menyatakan: *"Organisasi lokal adalah organisasi penduduk desa yang bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan. Sedangkan keberhasilan organisasi ini tergantung pada cara mendirikan dan mengembangkannya".*

Laporan kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Riau (1999:29) mengungkapkan beberapa kendala dalam pembangunan pedesaan: keterbatasan sarana dan prasarana perdesan, keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan untuk melaksanakan pembangunan dalam tempo yang lebih cepat, keterbatasan kemampuan kelembagaan pedesaan, dan keterbatasn kemampuan ekonomi pedesaan.

Hasil penelitian Tarmizi (1996:126) mengungkapkan pula bahwa masih sangat terbatasnya tenaga perencanaan pedesaan di Riau yang mampu untuk memenuhi keinginan masyarakat, sehingga banyak potensi alam dan potensi masyarakat di pedesaan yang ada di Riau belum dapat tergali.

Menurut penulis, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan pedesaan di Riau. *Pertama,* rapat LKMD ditingkat pedesaan belum aktif, selain persertanya belum mencerminkan perwakilan unsur masyarakat, LKMD dan aparat pedesaan pun tidak mempunyai kemampuan untuk membahas rencana pembangunan dengan baik, sehingga rencana pembangunan yang dibuat bukan merupakan kebutuhan masyarakat melainkan hanya keinginan beberapa orang yang terlibat di dalam perumusan rencana pembangunan. *Kedua,* data dan informasi sebagai bahan dalam perumusan rencana perumusan pembangunan kurang lengkap, sehingga rencana

pembangunan yang dibuat tidak didasarkan pada situasi dan kondisi yang sesungguhnya. *Ketiga,* pihak pemerintah menganggap rencana yang diusulkan tidak realistis sehingga kebanyakan program pembangunan ditetapkan secara sepihak dari atas, karena program pembangunan kebanyakan ditetapkan dari atas, dengan demikian kurang memperhatikan kultur masyarakat, daya dukung wilayah yang bersangkutan, dan peranan kelembagaan, sehingga hasil pembangunan belum optimal. *Keempat,* program pembangunan yang dibuat selama ini kurang mengikutsertakan masyarakat lokal, sehingga hasilnya tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi pemberdayaan masyarakat di pedesaan. *Kelima,* Sebagian besar masyarakat di pedesaan menganggap bantuan pemerintah sebagai sesuatu hal yang harus dinikmati, dengan demikian semakin menggantungkan dan membiasakan diri untuk menunggu biaya pembangunan dari pemerintah.

Alternatif pemecahan permasalahan adalah perencanaan pembangunan pedesaan dengan pendekatan kontekstual dari sistem perencanaan strategis, karena dianggap dapat menemukan model-model perencanaan pembangunan pedesaan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi pedesaan, yang dilihat dari aspek: potensi masyarakat, keadaan pemerintahan desa, sumber pendapatan desa, kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, kebutuhan pasar dari sumber pedesaan, perkembangan teknologi, dan investasi pemerintah dan swasta nasional, dalam rangka efektivitas perencanaan pembangunan pedesaan.

Penulis meyakini bahwa sistem perencanaan pembangunan pedesaan belum efektif, karena tingkat keberhasilan pembangunan pedesaan yang dicapai belum

optimal. Berdasarkan laporan (BAPPEDA Tkt. I Provinsi Riau, 1998) bahwa : Provinsi Riau pada Repelita VI tingkat laju pertumbuhan ekonominya cukup tinggi yaitu rata-rata 9,48 %. Dalam kaitannya dengan usaha penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan, struktur perekonomian (PDRB) Provinsi Riau telah memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, Provinsi Riau sebagai penyumbang pendapatan nasional terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk hasil, minyak bumi perkapita sebesar Rp. 3.092.700, (urutan kedua di Indonesia) dan PDB tidak termasuk minyak Rp. 510.900,- perkapita (urutan kelima di Indonesia). Namun , di sisi yang lain pengeluaran rata-rata perkapita penduduk pedesaan hanya sebesar Rp. 147.700,- (urutan ke-24 di Indonesia).

Kedua, Provinsi Riau merupakan penghasil migas terbesar setelah Kalimantan Timur. Pada kenyataannya relatif sedikit bagian dari kegiatan pada sektor migas yang dapat dikuasai pengelolaannya oleh daerah Riau, sehingga imbas keberhasilan migas di Riau terhadap pendapatan masyarakat secara langsung relatif akan melewati proses yang panjang, kecuali perusahaan dan industri besar tersebut mengikut sertakan masyarakat atau masyarakat mendapat akses ke perusahaan tersebut.

Ketiga, perkembangan kegiatan yang secara langsung dan dalam jangka pendek berkaitan dengan kegiatan ekonomi sebagian besar anggota masyarakat adalah kegiatan tanpa migas. Dengan demikian, gambaran yang ditunjukkan oleh sektor non migas akan lebih menggambarkan kondisi masyarakat banyak yang sebenarnya.

Beberapa implikasi penting tersebut memberikan gambaran betapa telah terjadinya kesenjangan struktur pendapatan masyarakat pedesaan. Sekelompok kecil masyarakat sebagai pemilik perusahaan pertambangan, perkebunan, industri pengolahan (*manufactur)* kayu lapis, telah meraih keuntungan dengan pendapatan perkapita yang cukup tinggi atas sumber-sumber kekayaan alam, sedangkan sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan pendapatan perkapitanya cukup kecil.

Hasil penelitian Rusli, dkk., (1996:1-2) mengungkapkan bahwa penduduk di Provinsi Riau sekitar 77 % (1990) berpendidikan sekolah dasar. Sedangkan tingkat perndidikan lanjutan sampai tamat, menurut sensus tahun 1996 (BPS, 1997); yang tamat SLTP (13,98 %); tamat SLTA (11,64 %); tamat Diploma (0,94 %); dan tamat Universitas (0,85 %). Angka tersebut mengakibatkan tingkat pendidikan angkatan kerja rendah, sehingga banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah Provinsi Riau, dan hanya sebagian kecil saja tenaga kerja lokal yang dapat tertampung di berbagai sektor industri dn perkebunan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurut BAPPEDA Tingkat I Riau (1996) sebesar 8,72 %. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan cukup besarnya angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau tentunya merupakan suatu fenomena lain dalam perencanaan pembangunan pedesaan.

Demikian pula dengan perkembangan kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN, 1999) pada laporannya mengungkapkan bahwa tahapan keluarga sejahtera penduduk Riau dalam persentase adalah : prasejahtera (6,84 %), sejahtera I (29,18

%), sejahetra II (37,32 %), sejahtera III (20,76 %), dan sejahtera plus (5,9 %). Kemudian, menurut sensus penduduk (1996) mengungkapkan bahwa usia harapan hidup rata-rata: 66,4 tahun, angka kematian bayi 53 permil, angka kematian ibu melahirkan 425/100.000, kelahiran dengan pertolongan medis sebesar (59,3 %), dan peserta keluarga berencana aktif (43,75 %). Angka tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Riau cukup rendah.

BAPPEDA Tingkat I Riau (1999) dalam laporannya mengungkapkan pula bahwa di Provinsi Riau masih terdapat 460 desa tertinggal dan penduduk dibawah garis kemiskinan sejumlah 436.859 orang (9,5 %) dan setelah terjadinya krisis ekonomi penduduk dibawah garis kemiskinan di Riau pad tahun 2000 bertambah mencapai 1.779.631 orang (42,45 %).

Angka-angka tersebut diatas merupakan sebagian dari indikator tingkat pencapaian pembangunan di Provinsi Riau, yang memberi indikasi kepada belum berhasil atau suatu kondisi yang masih kurang menguntungkan, terutama yang dirasakan oleh ± 68,26 % masyarakat yang tinggal di pedesaan.

D. Solusi Fokus Pembangunan Pedesaan di Riau

Dari berbagai kebutuhan masyarakat perdesan, kebutuhan pengembangan sumber daya manusia adalah penting, sebagaimana dinyatakan Mc. Clelland (Budiman, 1996:23), pengembangan sumber daya manusia tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem sosial yang dapat mendorong lahirnya manusia kreatif atau manusia berprestasi. Harvey dan Bowin (1986:63-87) menyatakan,

perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk mengantisifasi permintaan tenaga kerja yang terampil. Coombs dan Ahmed (Todaro, 1995:37-39), mengemukakan empat (4) pendekatan untuk meningkatkan sumberdaya manusia pedesaan, yaitu penyuluhan, pelatihan, swadaya terpadu dan pembangunan terpadu.

Bahkan banyak para ekonom menyatakan bukanlah sumber daya modal atau materi yang sepenuhnya menentukan karakterisasi dan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial pedesaan, melainkan sumber daya manusia. Pandangan yang demikian sejalan dengan yang dinyatakan Dukrust (Tjokroamidjodjo, 1995:40) bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan dapat dicapai dengan cara memperbaiki faktor manusia *(the human factor)* dan disertai peningkatan mutu organisasi dan teknik secara berangsur, selain itu disebabkan pula oleh perbaikan mutu pendidikan angkatan kerja. Fabricant (Tjokroamidjojo:1994:44) menambahkan bahwa perbaikan sumber daya mausia *(human factor)* memberikan kontribusi yang besar bagi percepatan laju pembangunan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai bagian pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial.

Berdasarkan pandangan Fabricant tersebut maka investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan juga kesehatan dan gizi. Karena perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif-inisiatif dan sikap kewiraswastaan dan akan tumbuhj pula lapangan-lapangan kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional akan meningkat. Kalau pembangunan telah dapat menciptakan manusia yang memiliki sifat

kewiraswastaan, baru peranan modal, (*capital stock)* dan teknologi yang sesuai mempunyai manfaat yang besar. Dengan demikian, peningkatan kesempatan pendidikan kuantitatif dan kualitatif yang cepat akan merupakan kunci pokok bagi keberhasiln pembangunan masyarakat pedesaan.

Sistem perencanaan strategi ditujukan pula pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat, sebagai mana yang dinyatakan Smith (Tjokromidjojo, 1995:30) bahwa sistem ekonomi yang menyerahkan aturan dan penguasaan ekonomi kepada masyarakat dan perlunya perbagian kerja, serta iklim berusaha yang kondusif. Kemudian Smith dan Mill (Todaro, 1995:391) menyatakan dalam pembangunan ekonomi perlu pula memperhitungkan faktor non ekonomi yaitu kepercayaan masyarakat, kebiasan berpikir, adat istiadat, budaya usaha dan corak kelembagaan masyarakat. Selanjutnya, Keynes dan Domar (Salim, 1976:34) menyatakan bahwa perlu investasi dan modal kerja dalam menopang ekonomi masyarakat, Comb dan Daoglas (Tjokroamidjojo, 1985:36) menyatakan pula bahwa pembangunan ekonomi memerlukan alat-alat modal, tenaga kerja dan teknologi. Kemudian dari pada itu Todaro (1995:367) menyatakan diversifikasi tanaman atau pertanian campuran merupakan langkah yang dianggap masuk akal untuk beralih lebih dari pertanian sub sistem ke spesialisasi produksi.

E. Kesimpulan

Berkaitan dengan perencanaan strategi dalam pembangunan, ada beberpa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam pembangunan masyarakat pedesaan, di antaranya:

- Tenaga kerja terampil dan sehat, pembentukan melalui peningkatan sumber daya manusia.
- Petani yang memiliki tanah (lahan) melalui kebijakan *landreform*.
- Dana untuk investasi dan modal kerja, melalui penyediaan kredit jangka panjang dan kecil tingkat suku bunga yang disediakan bank pemerintah atau koperasi desa.
- Seperangkat aturan yang mencegah terjadinya monopoli/persaingan yang tidak sehat dan iklim sosial politik yang kondusif.
- Jaminan distribusi dan pemasaran dari hasil usaha di pedesaan.
- Teknologi tepat guna (yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik sosial ekonomi desa).
- Pembagian kerja (usaha) secara lokal, regional dan nasional, melalui pengembangan spesialisasi produksi yang sesuai dengan sumber-sumber setempat.
- Dukungan kebijakan dan kemauan politik dari pemerintah.
- Berfungsinya lembaga-lembaga dalam masyarakat.

F. Daftar Kepustakaan

Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial dalam Pembangunan.*Bandung

Andrew, Mc C. dan Chia Lin Send. 1982. *Too Rapid Rural Development.* Athens : Ohio University Press.

Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan.* Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Alvin Y.So. 1990.*Social Chang and Development Modernization, Dependency, and World-System Theories.* London : Sage Publications.

Belling dan totten. 1985. *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan.* Terjemahan Oleh Mien Joebhar dan Hasan Basari. Jakarta : CV Rajawali.

Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga.* Jakarta : Gramedia.

Cernea, Michael M. 1991. *Putting PeopleFirst Sociological Variables in Rural Development.* Washington D.C. : Oxford Uniuversity Press.

Collier, William. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia.* Colorado: Westerview Boulder.

Eaton, Yoseph W (ed.). 1972. *Guideline to Development Theory Formulations. Institution Building and Development: From Concepts to Application.* London : Sage Publication.

Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff. 1982. *Local Organizations : Intermediares in Rural Development*. Ithaca : Cornell University Press.

Esman, Milton J. 1972. *Institution Building and Development: from concepts to application.* London : Sage Publication.

------------ . 1991. *Management Dimensions of Development : Perspectives and Strategies.* Conecticut : Kumarian Press

Friedman, J. 1981. *The Acrtive Community in Rural Development: National Policies and Experiences.* Nagoya : Maruze Asia.

Hanafiah, T. 1982. *Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah Pembangunan Pedesaan*. Bogor : Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Hansen, Gary E. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia.* Colorado : Westview.

Hirschman, A. 1967. *Development Project Observed.* Washington D.C : Brookings.

Ife, Jim. 1995. *Community Development : Creating Alternatives Visions, Analysis and Practices.* Australia : Longman Inc.

Ismail, Maimunah. 1989. *Pengembangan Implikasi ke Atas Pembangunan Masyarakat.* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan.

BAB VI

TRANSPARANSI PEMBANGUNAN;

SUATU UPAYA TERCIPTANYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN RASA KEADILAN DALAM MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Mempelajari RAPBD Riau 2003, saya yakin akan banyak timbul pertanyaan publik, terutama kalangan mahasiswa, dari angka-angka yang ada banyak menimbulkan pertanyaan dan rasa kecurigaan. Jika pihak DPRD sebagai wakil rakyat tidak menyeleksi dan membiarkan RAPBD ini seperti adanya maka DPRD patut pula dicurigai rakyat, barangkali mau berkolusi dengan eksekutif. Secara umum ada beberapa hal katakanlah hanya contoh atau sampel yang patut kita pertanyakan dari RAPBD Riau 2003 , misalnya :

1. Dari Pos Penerimaan :

a. Masih besarnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (sekitar 204 milyar), menunjukkan bahwa asumsi yang digunakan kurang tepat dan antara penerimaan dengan pengeluaran tidak berimbang, sebagai salah satu ciri anggaran yang kurang baik.

b. Dibandingkan tahun 2002 penerimaan menurun (mencapai 98,20 %), salah satu ciri kinerja pemerintah yang kurang baik.

c. Dari sumber penerimaan Retribusi daerah meskipun naik dari tahun sebelumnya (182,32 %) agak aneh, namun merupakan sumber yang paling kecil (2,7 milyar), patut ditelusuri dan dipertanyakan.

d. Kebanyakan angka yang tertulis pembulatan dalam jutaan, tidak sampai kepada satuan tau koma sekian, sesuatu yang tidak masuk akal, semakin menambah kecurigaan publik.

2. Pos Belanja :

A. Belanja Rutin:

a. Penerimaan menurun kok belanja rutin meningkat (109,81 %).

b. Belanja barang meningkat (107,07 %), belanja pemeliharaan meningkat (123, 99 %), dan biaya perjalanan dinas meningkat juga (110,39 %).

c. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain-lain 134 milyar, tidak jelas maksud dan rinciannya.

d. Pengeluaran tidak disangka dan diduga 1 milyar, cukup besar dan aneh, seperti tembak diatas kuda.

e. Kita ambil saja satu contoh pos biaya Gubernur 4,046 milyar atau lebih kurang 8,5 juta sehari, jika dibandingkan dengan Rasulullah yang terkadang hanya makan 10 butir kurma sehari,

alangkah banyaknya Pejabat sekarang ini tidak mengikuti sunatullah (Sunat Rasul).

f. Dari semuanya itu memang kelihatan memang tidak ada keinginan pemerintah kita untuk efesiensi.

B. Belanja Pembangunan:

a. Belanja rutin meningkat (109,81 %), sedangkan belanja pembangunan menurun (93,47 %).

b. Pembangunan ekonomi kerakyatan 514,6 milyar, namun sampai saat ini pendukuk Riau di bawah garis kemiskinan 42 %, rakyat di perdesaan dan kantong kemiskinan di perkotaan masih banyak yang melarat hampir sekarat.

c. Pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa 43,5 milyar, cukup besar tetapi kenapa KKN tambah meningkat ?

d. Pembinaan dan pengembangan SDM 265, 7 milyar, cukup besar tetapi kenapa masih banyak yang buta huruf dan anak-anak yang putus sekolah.

e. Pembangunan kesehatan dan olah raga 146,4 milyar, tetapi kenapa masih banyak yang sakit terutama sakit ingatan. Manakah yang lebih diutamakan masyarakat bisa makan 3 kali sehari dibandingkan dengan meskipun PSPS menjadi juara liga Bank Mandiri.

f. Pembianaan dan pengembangan kebudayaan 6,2 milyar, meningkat (105,21 %) apakah karena banyak budayawan yang marah-marah,

kenyataannya kita semakin tidak berbudaya, semakin tidak beridentitas, lihat saja budaya tertib lalu lintas, cara berpakaian. Kebudayaan yang memiliki nilai tinggi bukan dicerminkan dari simbol-simbol, lampu kota kelap-kelip, membangun gedung teater, tetapi yang harus ditonjolkan adalah nilai-nilai sikap dan perilaku manusianya.

g. Pembangunan ekonomi kerakyatan katakanlah 2x lipat anggarannya dibandingkan pembangunan SDM, apakah semakin baik ekonomi masyarakat otomatis meningkatkan semangat wirausaha, *need for acheavment* (keinginan berprestasi) sekaligus membuka lapangan kerja atau sebaliknya prioritas pembangun atau investasi dibidang SDM justru mapu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti dipraktekkan negara maju misalkan jepang dan singapura yang unggul SDM dan teknologinya.

Dari beberapa pernyataan di atas sebagai hasil analisis singat terhadap RAPBD Riau 2003, patutlah pada hari ini masih banyak yang perlu dipertanyakan, kelihatan belum transparan dan masih menimbulkan banyak kecurigaan. Supaya kita tidak menaruh curiga kepada anggota Dewan yang terhormat khawatir main mata dengan eksekutif, maka perlu kiranya kita ikut serta memberikan pandangan, koreksi dan kontrol, karena kita merasa masih memiliki hak-hak publik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negeri ini.

Berikut ini ada suatu ilustrasi terutama disampaikan kepada adik-adik mahasiswa, kalau adik-adik setelah tamat kuliah jadi sarjana janganlah melamar menjadi seorang dosen, karena kalau anda ingin kaya tidak akan pernah cita-cita anda itu akan tercapai, sebab kalau mau punya rumah, punya mobil, anda harus *ngutang* atau kredit dulu. Setinggi apapun pendidikan saudara sampai tua tetap akan *ngutang*. Tetapi meskipun golongan, pangkat, eselon masa kerja seorang dosen sama dengan seorang pejabat, maka anda mungkin tidak perlu ngutang, karena anda akan segera mendapatkan mobil mewah dan rumah seperti istana. Anda tinggal pilih, yang penting anda harus ingat kalaupun anda menjadi kaya raya haruslah dengan jalan yang halal.

Kita jangan terlalu larut dengan soal RAPBD, mari kita berbicara soal pembangunan di Riau ke depan. Salah satu kunci keberhasilan pembangun terletak pada Kepemimpinan pemimpin kita, karena menyangkut hal mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi terhadap masa depan; kemudian mereka mempersekutukan orang dengan mengkomunikasikan penglihatan dan mengilhami mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan. Sedangkan manajemen menyangkut hal mengatasi kerumitan. Manajemen yang baik menghasilkan tata tertib dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat, dan memantau hasil lewat pembandingan dengan rencana. Degan demikian, kepemimpinan yang jujur dan manajemen yang transparan sebagai suatu yang penting bagi efektivitas organisasi yang optimal untuk pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.

Salah satu problem kebanyakan organisasi pemerintah (*public organization*) dewasa ini adalah kurang keterbukaan dan terlalu ditata-olah (*overmanaged*). Ke depan kita perlu memfokuskan ke arah pengembangan kepemimpinan dalam organisasi pemerintah daerah, karena orang yang ditugasi dewasa ini terlalu memperhatikan agar semua urusan senantiasa tepat waktu, tepat anggaran, dan melakukan apa yang dilakukan kemaren, mungkin hanya berbuat 5 % lebih baik. Sesungguhnya mereka itu tidak pernah dekat dengan masyarakat dan semangkin jauh dari berbuat jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan salah satu visi pembangunan daerah Riau yaitu terwujudnya Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara 2020, yang menjadi salah satu permasalahan penting yang sangat aktual dan faktual untuk dibahas sesuai dengan topik bahasan adalah diperlukannya transparansi pembangunan suatu upaya terciptanya pemerataan pembangunan dan rasa keadilan di masyarakat.

B. Beberapa *Issue* Penting Pembangunan Daerah Riau

Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Era Reformasi, berdasarkan kondisi, potensi dan kemampuan riil daerah. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Riau sekarang dapat dikatakan sedang giatnya melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saleh Djasit, ketika akan dipilih menjadi Gubernur Riau, dalam bukunya (1998:1-2) menyatakan ada beberapa kelemahan mendasar yang sangat mempengaruhi

keterbelakangan daerah Riau dibandingkan dengan daerah lainnya, antara lain: struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada pengusaha besar, sehingga kurang merata dan mengakar ke bawah (*trickle-down-effect*); kualitas sumber daya manusia (SDM) Riau yang masih lemah dan kurang mendapat sentuhan yang berarti; dan Pengelolaan sumber daya alam yang keuntungannya belum dibagi secara proporsional bagi daerah Riau. Selanjutnya beliau menyatakan untuk mengatasinya maka diperlukan strategi dasar yaitu : *Pertama,* mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada penguatan usaha kecil, menengah dan koperasi; *kedua,* meningkatkan SDM untuk mampu bersaing dalam merebut setiap peluang di berbagai sektor kehidupan; dan *ketiga* diupayakan otonomi daerah yang lebih luas dan terus memperjuangkan pembagian keuntungan yang proporsional dalam pengelolaan setiap sumber daya alam yang dieksplorasi di daerah Riau. Semua itu untuk menuju daerah Riau di era baru masa depan yang lebih baik.

Penulis sendiri mengidentifikasi ada beberapa *issue* penting yang harus segera diatasi oleh kepemimpinan pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian di Asia Tenggara 2020, antara lain :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang kurang bersih, kinerja yang lemah, dan kurang keterbukaan;
2. Pengelolaan anggaran pembangunan yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan kualitas dan kapabilitasnya;
3. Lembaga pengawasan yang lemah kinerjanya dan kurang dipercaya;

4. Birokrasi termasuk badan dan Dinas daerah yang masih membengkak dan tidak efisien;
5. Manajemen pembangunan yang masih *amburadul* atau tidak profesional;
6. Tumpang tindih dan saling bertentangannya masing-masing PERDA termasuk pruduk hukum yangh lebih tinggi;
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
8. Rendahnya SDM dan disiplin pegawai pemerintah dan masyarakat dalam berusaha;
9. Tidak terpadunya pemerataan dengan pertumbuhan ekonomi;
10. Kurangnya *bargening* dengan Pemerintah Pusat dalam rangka otonomi khusus;
11. Kecilnya kontribusi sektor swasta besar kepada daerah;
12. Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam dan potensi masyarakat;
13. Belum memadainya data dan infomasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan implementasi program pembangunan (dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan, POLDA, *Master Plan*, PROPEDA; PROTADA, dll);
14. Pembangunan belum didasarkan karakteristik potensi alam dan potensi masyarakat yang dimiliki daerah sehingga belum jelasnya daerah-daerah mana saja yang merupakan basis pengembangan dan yang memiliki keunggulan kompetitif pada bidangnya.

15. Kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa didominasi cara yang tradisional dan sedikit penerapan ilmu dan teknologi, artinya perlu pengembangan dan modernisasi;
16. Kurang membuka kerjasama antar daerah Kabupaten/ Kota dan antara daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten/Kota Provinsi lain dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan hubungan dagang;
17. Kurang membuka kerjasama dengan Negara Anggota AFEC, NAFTA, WTO, GAAT, MEE, khususnya dalam menarik minat investasi dan perdagangan.

Jika dielaborasi secara runtut lagi masih ada sederetan angka lagi yang mengidentifikasi masih banyaknya persoalan yang harus diatasi pemimpin daerah otonom Riau dalam rangka mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian di Asia Tenggara 2020 yang sama artinya dengan di atas pertumbuhan ekonomi Negara Singapura sebagai Salah satu Negara dari lima (5) Negara Paling termakmur di Dunia.

Visi dan misi ini akan mendekati kenyataan apabila semua pihak: pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat memiliki komitmen dan dapat bekerjasama yang saling menguntungkan dan adil. Terutama dalam kegiatan produksi dan distribusi dengan memanfaatkan potensi alam dan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Tentunya apabila dapat mewujudkan dan mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis dari potensi yang dimiliki, yaitu dimulai dari ukuran centimeter, milimeter, kilometer dan seterusnya dari luas lahan dan

potensi kelautan dimanfaatkan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan perdagangan secara professional, ekonomis dan berteknologi tinggi.

C. Beberapa Bidang Pembangunan di Riau yang Perlu Mendapat Perhatian

Berdasarkan tingkat perkembangan pembangunan daerah di Riau, apabila dirincikan berdasarkan bidang pembangunan, memperlihatkan bahwa perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah pada bidang kualitas sumber daya manusia belum optimal. Sesungguhnya program peningkatan S.D.M di daerah tidak saja ditujukan kepada kedisiplinan dan penguasaan atau pemahaman materi pekerjaan dan pelayanan yang diberikan aparatur, melainkan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha meningkatkan pendapatan perkapitanya.

Perbaikan faktor manusia (*human factor*) memberikan kontribusi yang besar bagi percepatan laju pembangunan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai bagian pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial.

Demikian pula dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan menghidupkan dan memfungsikan kembali lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mendukung perekonomian masyarakat. Misalanya KUD, Bank Pembangunan Daerah atau BPR, Pasar dan pengadaan sarana produksi dan distribusi Daerah. Apabila semua masyarakat usahanya sudah diwadahi oleh KUD

yang didukung pula dengan pengadaan sarana produksi dan distribusi, sementara Bank Pembangunan Derah atau lembaga keuangan lainnya menyediakan fasilitas kredit untuk modal usaha dan modal kerja maka diharapkan masyarakat lebih akses dan berdaya dalam berusaha.

Penumpukan produksi dapat pula diatasi apabila KUD dan berbagai lembaga perekonomian lainnya benar-benar berfungsi tidak saja sebagai wadah produksi, melainkan juga sebagai penyalur (distribusi) produk daerah ke pasar lokal, regional bahkan ke pasar Internasional.

Dukungan Pemerintah yang sangat dibutuhkan di sini adalah pembinaan lembaga perekonomian dan dukungan (*support*) dana yang dititipkan pada lembaga KUD atau lembaga keuangan (Bank Perkeriditan Rakyat). Alternatif ini perlu lilakukan, karena pengalaman telah membuktikan bahwa dana yang disalurkan melalui berbagai program/ proyek ternyata kurang efektif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia di daerah sebagaimana maksud dan tujuan program/proyek diadakan. Sebagai akibat dari proses dan struktur program/proyek terlalu birokratis dan regulasi. Selain dari itu, dukungan Pemerintah diperlukan pula dalam hal memberi informasi produk daerah apa saja yang dibutuhkan pasar lokal, regional dan pasar Internasional.

Secara umum pembangunan di bidang fisik khususnya penyediaan sarana dan prasarana di daerah belum pula optimal. Misalnya, yang hampir terlupakan adalah pengadaan fasilitas dan perangkat pendukung pelatihan kerja kepada petani dan nelayan. Selain bertujuan meningkatkan kemampuan petani dan nelayan pelatihan ditujukan pula kepada proses pengenalan dan adaptasi teknologi baru

terhadap teknologi dan budaya kerja setempat. Tidak mungkin petani dan nelayan kita akan mencapai taraf kemajuan yang lebih baik tanpa menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi dalam berusaha tani, meskipun telah didukung oleh sarana dan prasarana umum yang memadai.

Selanjutnya, dalam bidang pembangunan lingkungan hidup di daerah ternyata hasilnya belum pula optimal. Masih terdapat beberapa faktor kerusakan lingkungan, khususnya tanah perdesaan di Riau yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Kerusakan karena faktor alam banyak disebabkan oleh gelombang pasang terutama Desa-desa pesisir dan pantai. Sedangkan kerusakan karena faktor ulah manusia disebabkan oleh sikap yang berlebihan dari perusahaan (investor) dalam pembukaan lahan perkebunan. Mengakibatkan gundulnya hutan yang berdampak pada tingkat erosi tanah yang cukup tinggi. Faktor kerusakan tanah yang lain disebabkan adat atau tradisi pembagian tanah warisan, sehingga lahan menjadi sempit dan kurang produktif (*pregmentatie*), tanpa ada usaha membuka lahan baru yang lebih luas.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Riau Dalam Rangka Mewujudkan Pusat Perekonomian di Asia Tenggara

Perlu ada perubahan arah kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Riau ke depan. *Pertama*, pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan demokrasi politik; *Kedua*, pembangunan ekonomi kerakyatan yaitu pemberdayaan koperasi, kemitraan usaha, anti monopoli, oligopoli dan kartel, pengaturan lahan pertanian, peningkatan

permodalan, pengembangan teknologi, pengaturan distribusi dan pemasaran; *Ketiga*, pembangunan sumber daya manusia dan *Keempat*, penyelenggaraan otonomi dan perimbangan keuangan Pusat dengan Daerah.

Pembangunan demokrasi politik terutama dalam hal prakarsa, daya kreasi dan hak-hak politik masyarakat Daerah belum dapat terekspresikan dengan baik. Demikian pula dalam hal partisipasi individu dan masyarakat daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Keberadaan Pemerintah dengan kebijakan dan misinya tersediri telah membuat masyarakat daerah tidak ada pilihan kecuali hanya mengikut. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mencari penyesuaian antara keinginan arus bawah dengan keinginan pihak atas, tidak lain adalah dengan mengembangkan demokrasi politik. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan sekaligus mengurangi campur tangan yang berlebihan dari Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan. Di sinilah arti pentingnya pembangunan demokrasi politik di daerah dimasa yang akan datang.

Di Riau dalam hal pembangunan ekonomi kerakyatan belumlah dapat dikatakan berhasil. Pembangunan perekonomian masyarakat di Riau telah menimbulkan dampak terjadinya kesenjangan sosial dan kesenjangan tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Misalnya, Provinsi Riau sebagai penyumbang pendapatan nasional terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk hasil minyak bumi perkapita sebesar Rp. 3.092.700, (urutan kedua di Indonesia) dan PDB tidak termasuk minyak Rp. 510.900,- perkapita (urutan kelima di

Indonesia). Namun, disisi yang lain pengeluaran rata-rata perkapita penduduk daerah hanya sebesar Rp. 147.700,- (urutan ke-24 di Indonesia).

Dengan demikian, ada sekelompok kecil masyarakat sebagai pemilik perusahaan pertambangan, perkebunan, industri pengolahan (*manufactur*) kayu lapis, telah meraih keuntungan dengan pendapatan perkapita yang cukup tinggi atas sumber-sumber kekayaan alam di Riau, sedangkan sebahagian besar masyarakat terutama yang tinggal di perdesaan pendapatan perkapitanya cukup kecil.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 1999) pada laporannya mengungkapkan bahwa tahapan keluarga sejahtera penduduk Riau dalam persentase adalah: prasejahtera (6,84%), sejahtera I (29,18%), sejahtera II (37,32%), sejahtera III (20,76%), dan sejahtera plus (5,9%). Angka ini menunjukakan bahwa belum meratanya pendapatan masyarakat dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAPPEDA Provinsi Riau (1999) dalam laporannya mengungkapkan pula bahwa di Provinsi Riau masih terdapat 460 Desa tertinggal dan penduduk dibawah garis kemiskinan sejumlah 436.859 orang (9,5%) dan setelah terjadinya krisis ekonomi penduduk dibawah garis kemiskinan di Riau pada tahun 2000 bertambah mencapai 1.779631 orang (42,45 %). Dengan meningkatnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Riau, membuktikan bahwa hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat sampai lapisan terbawah (*trickle-down effect*) yang melekat pada paradigma pertumbuhan (*growth paradigm)* ternyata tidak terwujud bahkan yang terjadi justru kesenjangan semakin melebar.

Dengan demikian, paling tidak kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Riau dimasa mendatang mengarah kepada: ***pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan demokrasi politik,*** dan ***pembangunan ekonomi berakar kepada kerakyatan.***

1. Pembangunan Demokrasi Ekonomi Bergandengan Dengan Demokrasi Politik

Kemajuan ekonomi suatu masyarakat supaya dapat berkesinambungan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi untuk kemajuan diri termasuk menggunakan hak-hak politiknya. Prakarsa itu hanya akan tumbuh apabila ada kesempatan yang sama dan berkeadilan kepada setiap masyarakat dalam proses pembangunan.

Atas dasar pandangan perlu adanya daya prakarsa dan kreasi masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pembangunan harus tercipta sedemikian rupa sehingga ada kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri setiap individu dan masyarakat.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas pada bidang tertentu saja, melainkan termasuk kepada semua bidang pembangunan : ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam. Singkatnya, kemajuan ekonomi suatu masyarakat tidak akan mampu bertahan, tanpa adanya pembangunan demokrasi politik dalam masyarakat tersebut.

Pembangunan sosial (*social building*) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem sosial yang dapat mendorong

lahirnya manusia kreatif atau manusia berprestasi, termasuk pula sikap mental masyarakat dan aparatur Pemerintah.

Selama ini pembangunan hanya difokuskan pada pembangunan fisik dan mengabaikan faktor-faktor non fisik yang justru memiliki potensi yang cukup besar untuk keberhasilan pembangunan. Smith dan Mill (Todaro, 1995:391) menyatakan dalam pembangunan ekonomi perlu pula memperhitungkan faktor non ekonomi yaitu kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat istiadat, budaya usaha dan corak kelembagaan masyarakat.

Pembangunan daerah di Riau termasuk gagal dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang cukup lebar yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai akibat tidak meratanya pembagian sumber-sumber produksi. Sekelompok orang dengan mudahnya memiliki dan menguasai faktor produksi yang diperoleh dari sumber kekayaan negara dan Daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah terlalu berlebihan dan berpihak kepada sekelompok konglemerat yang dianggap memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian. Di pihak lain, mayoritas masyarakat usaha menengah, kecil dan koperasi tidak memperoleh akses dan kesempatan mendapatkan sumber-sumber produksi yang dikuasai negara dan Daerah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Strategi pembangunan yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan) yang hanya menguasai usaha menengah dan kecil sudah sangat mendesak dilaksanakan, melalui kebijakan parampingan birokrasi dan deregulasi diberbagai peraturan, misalnya dalam pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada usaha kecil dan ekonomi

lemah harus lebih dipermudah. Tentunya, jika Pemerintah Daerah benar-benar ingin mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi dalam pembangunan dimasa yang akan datang.

Pada periode pembangunan selama pemerintahan orde lama berkuasa yang mengutamakan pembangunan politik sampai kepada lapisan terbawah di perdesaan, pada kenyataannya telah gagal menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Demikian pula dengan pengalaman selama pemerintahan orde baru berkuasa, juga dianggap telah gagal karena terlalu memfokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat semata dalam rangka mengejar pertumbuhan. Oleh karena itu sungguh sangat tepat di era reformasi yang juga dalam waktu yang bersamaan sedang mengalami krisis ekonomi, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan perubahan strategi pembangunan daerah dari strategi mengabaikan aspek pembangunan demokrasi politik menuju kepada strategi pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan pembangunan demokrasi politik.

2. Pembangunan Ekonomi Berakar Pada Kerakyatan

Sebagai akibat penerapan secara bulat konsep ekonomi liberal kapitalis, tanpa menyesuaikan dengan peradaban sosial budaya masyarakat daerah di Provinsi Riau, ternyata kemajuan-kemajuan ekonomi daerah di Provinsi Riau dianggap telah gagal, karena hanya menguntungkan sebahagian kecil individu dan kelompok dalam masyarakat.

Sebagai akibat kebijakan pembangunan yang keliru tersebut, ternyata sekelompok individu dalam masyarakat yang tinggal di ibu kota sudah baik keadaannya, secara

ekonomi lebih mampu dan dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan Daerah Provinsi Riau. Sebahagian kecil jumlah masyarakat ekonomi kelas atas selalu mendapat peluang dan kesempatan yang lebih luas bila dibandingkan dengan mayoritas masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di daerah kumuh atau kantong kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Dengan demikian yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin bahkan menjadi lebih miskin lagi.

Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Kalau demokrasi ekonomi dijabarkan maka bermakna produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Kemakmuran yang hendak dicapai haruslah kemakmuran atas dasar keadilan sosial.

Dewasa ini masalah yang masih mengganjal bagi pembangunan demokrasi ekonomi di Provinsi Riau berdasarkan hasil penelitian, yaitu masih adanya ketidakseimbangan kemampuan dan kesempatan berusaha antara pihak-pihak diberbagai lapisan masyarakat antara yang menguasi dengan yang tidak menguasi sumber-sumber produksi. Sudah saatnya dimasa yang akan datang pembangunan ekonomi yang berakar kepada kerakyatan dianggap lebih tepat di terapkan di Provinsi Riau. Selain dapat meningkatkan kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah, juga sebagai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan sekaligus mengatasi kesenjangan sosial. Di antara upaya yang perlu

dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah kebijakan debirokratisasi dan deregulasi yang transparan dan seadil-adilnya.

Dalam rangka peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat di daerah Provinsi Riau tidak lain dengan memberdayakannya. Strategi yang dikembangkan adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan melalui upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan termasuk pula membangun pranata-pranatanya, dalam hal menanamkan nilai-nilai budaya modern misalnya kerja keras, keterbukaan, hemat, dan bertanggung jawab. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial daerah dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya melalui proses pembelajaran.

Pengembangan ekonomi yang berakar pada kerakyatan tetap pula mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas dan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, perlu pula mempercepat berbagai proses perubahan dari masyarakat daerah yang masih berpikir dan berprilaku tradisional ke masyarakat modern, dari sistem ekonomi yang subsistem ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan masyarakat terhadap pemberi bantuan menuju kemandirian dan pemberdayaan. Dalam hal ini sasaran ekonomi kerakyatan di daerah tidak lain adalah petani dan nelayan. Dalam kebijakan ekonomi kerakyatan, petani harus diberi hak kepemilikan, penguasaan

dan penggunaan tanah sebagai lahan pertanian, disediakan pula fasilitas kredit untuk permodalan dan teknologi tepat guna dalam rangka efektivitas berusaha.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan menghidupkan dan memfungsikan kembali lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mendukung perekonomian masyarakat. Misalnya KUD, Bank Daerah, Pasar dan pengadaan sarana produksi dan distribusi. Apabila semua masyarakat usahanya sudah diwadahi oleh KUD yang didukung pula oleh pengadaan sarana produksi dan distribusi, sementara Bank Daerah atau lembaga keuangan lainnya menyediakan fasilitas kredit untuk modal usaha dan modal kerja maka diharapkan masyarakat lebih akses dan berdaya dalam berusaha.

Penumpukan produksi dapat pula diatasi apabila KUD benar-benar berfungsi tidak saja sebagai wadah produksi, melainkan juga sebagai penyalur (distribusi) produk daerah ke pasar lokal, regional bahkan ke pasar Internasional.

Dalam perkembangannya, keberadaan investor di daerah sering menimbulkan konflik antara pemilik modal dengan petani sebagai pemilik lahan. Pada sisi yang lain, keberadaan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pemanfaatan potensi alam dan tenaga kerja sangat diharapkan masyarakat. Jalan tengah yang terbaik sebagai solusinya adalah perencanaan pembangunan harus pula menciptakan kerjasama dan saling ketergantungan (*komensalisma*) anatara investor dan petani.

Efektivitas penerapan teknologi daerah dapat dicapai dengan cara memadukan teknologi sendiri dengan teknologi dari luar, karena dianggap lebih cepat tingkat pemahaman

dan diharapkan lebih efektif dan efisien. Upaya penerapan inovasi dan teknologi di daerah, membutuhkan suatu strategi adaptasi antara modernisasi dengan tradisi.

Pendekatan pembangunan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia daerah, dapat dilakukan yaitu melalui penyuluhan, pelatihan, swadaya terpadu dan pembangunan terpadu. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai bagian pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial, karena itu investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan juga kesehatan dan gizi.

Salah satu kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah karena ketidakmampuan Kepala Daerah bersama DPRD dalam menyusun APPD. Dimasa yang akan datang salah satu faktor terpenting yang perlu direformasi dalam rangka proses pembelajaran menuju pemberdayaan masyarakat, sudah sangat mendesak pemerintahan Daerah perlu menata kembali sistem anggaran pendapatan dan belanja pembangunannya supaya lebih berkualitas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Riau yang berakar kepada kerakyatan, ada beberapa faktor penting yang harus dikembangkan di masa yang akan datang, antara lain :

Pertama, faktor sumber daya manusia. Sebagaimana telah diketahui ada dua kelompok pelaku dalam pembangunan yaitu Pemerintah dan masyarakat. Kedua pelaku pembangunan ini adalah sama-sama penting dan memberikan akses bagi pembangunan. Kedua pelaku pembangunan ini sama-sama perlu ditingkatkan kemampuan

sumber daya manusianya. Walaupun dipihak Pemerintah telah cukup memadai kekampuan daya pikir dan nalarnya dalam berkreativitas, namun dipihak masyarakat dirasakan masih banyak kelemahan, jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya. Oleh karena itu dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah Provinsi Riau, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan, dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam berusaha. Selain itu instansi yang terkait menyangkut masalah kegiatan pertanian harus pula rutin dan lebih serius lagi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan.

Kedua, faktor lahan pertanian. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah Provinsi Riau, faktor pemilikan lahan oleh petani sangat penting, dan justru perlu pengaturan, pembagian, dan penataan kembali kepemilikan hak-hak atas tanah. Selain perusahaan-perusahaan besar Pemerintah (BUMN) dan swasta yang menguasi lahan untuk perkebunan dengan areal yang begitu luas, meskipun hanya dengan hak guna usaha atau hak pakai dan sebahagian lagi penduduk kota yang begitu banyak menguasai lahan yang tidak produktif maksudnya tidak diusahakan, melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan dari hasil jual-beli sebagai pakang tanah. Sementara pada sisi yang lain petani kita yang ingin melakukan kegiatan usaha pertanian tidak mempunyai cukup lahan, sebagai akibat tidak mampu untuk membelinya atau tidak memiliki modal untuk membuka lahan baru. Dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Dinas Pertanahan harus benar-benar melakukan pemetaan, pembagian dan penggunaan lahan pertanian secara transparan dan seadil-adilnya, sehingga lahan-lahan yang tidak produktif dapat diserahkan kepada

masyarakat yang tidak memiliki atau lahannya sangat sempit untuk kegiatan berusaha.

Ketiga, faktor permodalan. Selain masalah lahan pertanian, petani di daerah Provinsi Riau, perlu pula memiliki modal dalam arti dana untuk investasi dan modal kerja. Jika tidak ada dana, sudah barang tentu petani tidak akan mungkin memiliki peralatan, bibit tanaman yang unggul, pupuk, racun hama dan biaya hidup selama kegiatan produksi. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus membuat program bantuan permodalan sebagai upaya mengatasi kesulitan permodalan petani dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Program permodalan petani untuk kegiatan berusaha, dapat dilakukan Pemerintah melalui kebijakan kredit lunak melalui bank milik Pemerintah Daerah, misalnya melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) dan PT.PER atau program bantuan khusus disalurkan kepada KUD atau Bank Desa yang telah dibentuk dan dibina secara mapan.

Keempat, faktor teknologi. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak modal, pengetahuan khusus dan teknologi tepat guna. Dengan penggunaan teknologi, misalnya : bibit unggul, pupuk, racun hama, dan peralatan mekanik, kegiatan pertanian diharapkan lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, petani secara menyeluruh harus dapat menikmati penggunaan bibit unggul, pupuk, racun hama, dan perlatan mekanik yang mudah didapat dan dengan harga yang relatif terjangkau oleh petani. Semua teknologi tersebut seharusnya tetap selalu tersedia, namun dalam kenyataannya di daerah Provinsi Riau teknologi tersebut sangat sulit didapat dan harganya

pun relatif cukup tinggi, terutama peralatan mekanik untuk kegiatan pengolahan lahan dan untuk kegiatan pasca panen. Karena itu, kebijakan pengembangan dan penemuan baru di bidang teknologi pertanian harus tetap selalu ditingkatkan, dalam rangka produktivitas, efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tani. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah Provinsi Riau mau bekerjasama dengan lembaga riset dan teknologi melalui berbagai perguruan tinggi yang ada di Daerah, misalnya dengan Fakultas Teknik dan Fakultas pertanian UNRI, UIR atau UNILAK.

Kelima, faktor distribusi dan pemasaran. Setelah kegiatan produksi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan distribusi dan pemasaran hasil produksi harus ditata sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa setiap hasil pertanian tetap terjual di pasaran lokal, regional dan internasional. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus menciptakan pengaturan dalam rangka memasarkan produk pertanian di daerah. Pemasaran lokal diserahkan kepada Koprasi Unit Desa dan pemasaran regional dan internasional harus ada koordinasi antara instansi terkait, misalnya: Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Gugus Kendali Mutu, termasuk pula Badan yang mengatur kegiatan Ekspor-Inpor.

Keenam, pemberdayaan koperasi. Perubahan mendasar pada fungsi koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan adalah dengan telah dikeluarkannya UU. No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi tidak lagi semata-mata sebagai organisasi ekonomi bertujuan sosial melainkan

sebagai organisasi ekonomi yang mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, struktur koperasi termasuk KUD di Provinsi Riau yang selama ini kurang efektif perlu dilakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Tidak saja perluasan usaha, manajemen yang baik, struktur modal yang kuat sampai kepada peningkatan sumber daya manusia pengurus dan keanggotaannya. Dengan demikian, strategi pemberdayaan koperasi, seharusnya diarahkan kepada : *Pertama*, posisi, peran dan fungsi Pemerintah Daerah haruslah mendorong peran serta, efisiensi, dan produktivitas masyarakat melalui koperasi; *Kedua*, meningkatkan kegairahan, kesadaran, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat; *Ketiga*, meningkatkan kemitraan usaha diantara sesama lembaga koperasi, dan antara koperasi dengan usaha swasta dan BUMN lainnya; dan *Keempat*, menciptakan iklim berusaha yang mendukung tumbuhnya koperasi secara sehat dan mandiri.

Ketujuh, kemitraan berusaha. Dalam perkembangan perekonomian masyarakat daerah di Provinsi Riau, sangat dirasakan adanya kepincangan struktural, antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah. Kesenjangan itu merupakan akibat dari tidak meratanya pemilikan sumber daya produksi dan produktivitas usaha, serta sistem distribusi dan pemasaran diantara pelaku ekonomi. Untuk memecahkan masalah ini menuntut perlu dilakukannya kemitraan berusaha, dan bukan ketergantungan dan persaingan yang tidak sehat. Kemitraan berusaha yang dimaksud adalah dalam rangka penciptaan hubungan kerja antara pelaku ekonomi

yang didasarkan kepada ikatan yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Pengalaman telah membuktikan bahwa dalam berusaha masing-masing pihak tetap saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, atas dasar kelebihan dan kelemahan ini setiap usaha dituntut untuk selalu berkerjasma dan bermitra. Justru di sinilah arti penting ekonomi kerakyatan. Usaha yang besar dan usaha kecil saling membutuhkan dan saling bekerjasama dalam rangka mencapai produktivitas dan efisiensi dalam persaingan yang sehat.

Dalam sistem perekonomian yang kita anut sebenarnya tidak ada persaingan bebas yang tidak seimbang, yang ada hanyalah persaingan sehat berupa perlombaan untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Usaha yang satu harus dapat menunjang usaha yang lain, dan tentunya merupakan bahagian dari yang lain. Perusahaan yang besar menopang dan mendorong yang kecil agar tumbuh besar, dan yang kecil membantu yang besar dalam penyediaan berbagai kebutuhan bahan mentah dan lain sebagainya. Pada akhirnya menciptakan suatu totalitas sistem usaha bersama untuk kesejahteraan bersama.

Pengalaman telah membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada perusahaan yang maju dan menjadi besar sendiri meninggalkan usaha-usaha lain yang kecil. Semua berhubungan, terkait dan interdependensi. Model kemitraan berusaha yang dimaksud dapat berupa hubungan yang saling menguntungkan (*komensalisma*), misalnya petani

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menyediakan bahan mentah, sedangkan pabrik selain menyediakan kebutuhan petani sekaligus mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menghasilkan minyak goreng untuk dipasarkan pada pasar lokal, regional dan internasional. Bentuk hubungan kerjasama ini dapat saja diterapkan pada hubungan antara petani dengan KUD yang memiliki pabrik pengolahan barang-barang produksi. Dengan demikian, kemitraaan usaha ini diharapkan pula dapat memberantas atau mengurangi kegiatan monopoli dan oligopoli dari sekelompok orang yang perekonomiannya yang sudah sangat kuat dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam kemitraan usaha, selain saling menguntungkan, juga harus adil dan dinamis. Adil, dalam arti kemitraannya tidak memberatkan kepada salah satu pihak. Dinamis, dalam arti tidak terpaku pada suatu keadaan, tetapi senantiasa disesuaikan dengan tuntutan keadaan situasi dan kondisi setempat, sehingga efektivitas, produktivitas, dan kualitas usaha kemitraan senantiasa tetap terjaga. Sampai saat ini, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ternyata konsep kemitraan berusaha di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik, karena itu diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat proses sosialisasi kemitraan berusaha. Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini adalah membuat kebijakan, menfasilitasi pertemuan dan dialog antara perusahaan-perusahaan besar Pemerintah (BUMN) dan swasta dengan petani sebagai pemilik lahan, tentang kemitraan berusaha.

Kedelapan, kebijakan anti monopoli, oligopoli dan kartel. Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, tidak

dibenarkan adanya praktik-praktik monopoli, oligopoli dan kartel. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi dan keadilan. Kegiatan monopoli sudah barang tentu tidak efisien, karena pelakunya secara sengaja membatasi keluaran dan membebankan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika keluaran atau produksi itu dihasilkan dalam kondisi persaingan yang murni dan sempurna. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan di sini bahwa monopoli atau sejenisnya seperti perusahaan-perusahaan BUMN adalah tidak efisien jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang murni bersaing, karena BUMN menghasilkan terlalu sedikit dengan beban biaya yang tinggi.

Berkurangnya persaingan atau kompetisi yang didukung oleh adanya subsidi Pemerintah, telah menyebabkan perusahaan-perusahaan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dituduh sebagai perusahaan yang dijalankan dengan manajemen yang kurang baik, tidak efisien dan dicemari oleh akses-akses birokrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Oleh karena itu, usaha apaun, besar atau kecil termasuk perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan Daerah yang kegiatannya berbau monopoli, harus diswastakan *(privatisasi)* murni dan dipaksa untuk dapat bersaing di pasaran yang bebas. Demikian pula halnya dengan kegiatan kartel, tidak dibenarkan ada dan berkembang dalam sistem perekonomian kerakyatan. Kegiatan kartel hanya menciptakan kelompok-kelompok usaha yang kecenderungannya dikuasai oleh sekelompok masyarakat saja, sedangkan sebagian besar masyarakat yang lainnya tidak mendapatkan akses dan kesempatan untuk berusaha. Untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek monopoli,

oligopoli dan kartel ini, Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus lebih serius melaksanakan undang-undang tentang pelarangan kegiatan monopoli, oligopoli dan kartel dalam setiap dunia usaha.

E. Kesimpulan dan Saran

Setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi pusat perhatian dalam rangka transparansi pembangunan suatu upaya terciptanya pemerataan pembangunan dan rasa keadilan di masyarakat antara lain:

1. Pendekatan pembangunan sebaiknya dengan manajemen strategies;
2. Melaksanakan sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan daerah yang kontekstual;
3. Segera mengatasi berbagai issue penting yang menyangkut dengan kinerja dan tampilan Pemerintah Daerah;
4. Mereformasi administrasi birokrasi pemerintah daerah dan peregeseran paradigma perencanaan pembangunan daerah;
5. Transparansi dan mengikutkan berbalai elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD Sebagai Perwujudan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
6. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Riau ditujukan kepada pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan demokrasi politik dan pembangunan ekonomi berakar kepada kerakyatan secara jujur dan berkeadilan.

F. Daftar Kepustakaan

Andrew, Mc C. dan Chia Lin Send. 1982. *Too Rapid Rural Development*. Athens : Ohio University Press.

Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Alvin Y.So. 1990.*Social Chang and Development Modernization, Dependency, and World-System Theories*. London : Sage Publications.

Belling dan totten. 1985. *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*. Terjemahan Oleh Mien Joebhar dan Hasan Basari. Jakarta : CV Rajawali.

Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia.

Cernea, Michael M. 1991. *Putting PeopleFirst Sociological Variables in Rural Development*. Washington D.C. : Oxford Uniuversity Press.

Collier, William. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia*. Colorado: Westerview Boulder.

Eaton, Yoseph W (ed.). 1972. *Guideline to Development Theory Formulations. Institution Building and Development: From Concepts to Application*. London : Sage Publication.

Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff. 1982. *Local Organizations : Intermediares in Rural Development*. Ithaca : Cornell University Press.

Esman, Milton J. 1972. *Institution Building and Development: from concepts to application.* London : Sage Publication.

------------ . 1991. *Management Dimensions of Development : Perspectives and Strategies.* Conecticut : Kumarian Press

Friedman, J. 1981. *The Acrtive Community in Rural Development: National Policies and Experiences.* Nagoya : Maruze Asia.

Hanafiah, T. 1982. *Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah Pembangunan Perdesaan.* Bogor : Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Hansen, Gary E. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia.* Colorado : Westview.

Hirschman, A. 1967. *Development Project Observed.* Washington D.C : Brookings.

Ife, Jim. 1995. *Community Development : Creating Alternatives Visions, Analysis and Practices.* Australia : Longman Inc.

Ismail, Maimunah. 1989. *Pengembangan Implikasi ke Atas Pembangunan Masyarakat.* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan.

Israil, Arturo. 1987. *Tnernational Development, Incentives to Performance.* Baltimore and London: The Jhon Hopkins University Press.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat.* Jakarta: CIDES.

BAB VII

EKONOMI RAKYAT

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalissi, demokrtisasi dan informasi, yang menerpa seluruh belahan dunbia telah mengakibatkabn tumbangnya pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini tidak lain sebagai akibat reformasi yang digaungkan rakyat menuntut keadilan politik, ekonomi, sosial dan hukum. Terlepas dari apapun bentuk dan siapapun orangnya, pemerintahan yang dapat bertahan, tidak lain adalah pemerintah yang mau melaksanakan konstitusi dan amanat rakyat yang diimplementasikan melalui berbagai bidang pembangunan.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah memasuki tahun ke 53 melaksanakan pembangunan sosial ekonomi. Selama itu memang telah ada kemajuan pembangunan yang dicapai, namun apapun bentuk yang dirasakan bukanlah perwujudan dari apa yang dinamakan ekonomi Pancasila. Selama ini pembangunan ekonomi Indonesia lebih cenderung menerapkan konsep ekonomi kapitalis liberal yang berakar

dari nilai-nilai sosial-budaya negara Barat. Sebenarnya budaya bangsa Indonesia tidak cocok menerapkan secara murni konsep ekonomi kapitalis liberal, karena sebagian masyarakat kita belum terbiasa dengan persaingan sehat, Pada satu sisi sering kita mendengar keluhan bahwa dimana-mana ada praktek monopoli dan kartel. Selain itu, pemerintah kita pun tidak bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada sisi yang lain pemerintah dalam membuat kebijakan tidak transparan, kinerja birokrasi yang lamban tidak efisien. Kesemuanya itu telah mengakibatkan jurang pemisah yang sangat curam antara orang-orang yang sangat kaya dengan yang sangat miskin. Lama kelaman kecemburuan sosial tidak dapat dibendung terus saja meningkat, yang ada pada akhirnya rakyat menuntut keadilan, menuntut demokrasi politik, ekonomi dan hukum.

Sebagai akibat ketidaksiapan bangsa untuk menerima kondisi ini maka muncul aksi kerusuhan yang tidak dapat dikendalikan. Bila menggunakan teori kedaulatan Polybius (ahli hukum dan negara), maka kondisi Indonesia sekarang ini telah mengarah kepada perubahan bentuk masyarakat dari yang tirani menuju masyarakat yang demokratis. Namun kalau terlalu bebas perlu dikhawartirkan jangan sampai menjadi anarki.

Terlepas dari apapun pendapat yang dilontarkan, kajian tentang ekonomi, rakyat pada saat bangsa mengalami krisis dirasakan sangat tepat, karena ekonomi rakyat yang berakar kerakyatan sebenarnya telah lama diidamkan oleh banyak pihak, hanya saja selama ini belum diberi kesempatan dan pada saat ini dirasa perlu untuk memikirkan kembali.

2. Perumusan Masalah

Di sini akar permasalahannya jelas, salah satu faktor yang dominan adalah tidak seimbangnya pembangunan ekonomi dan politik. Karena dirasakan kurang cocok menerapkan konsep ekonomi kapitalis liberal, banyak pakar di Indonesia mulai menggali dan mengembangkan kosep ekonomi rakyat yang berlandaskan Pancasila sebagai idiologi Negara diantanya Mubyarto, Bintoro Tjokroamdjoyo, Moeldjrto, Sri Bintang Pamungkas, Sajogyo, Adi Sasono dan Ginanjar Kartasasmita. Apa sebenarnya ekonomi rakyat itu.

B. Pembahasan

Ekonomi rakayat adalah ekonomi yang berdasarkan kerakyatan dan selalu bergandengan dengan demokratisasi ekonomi. Karena ekonomi rakyat tidak lain adalah ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat. Inilah konsep ekonomi yang dirasakan sebagai ekonomi Pancasila. Sebagai penjabaran dari ekonomi rakyat, ada beberapa variabel yang dapat dikembangkan sebagai ciri-ciri dari ekonomi rakyat, antara lain :

1. Demokrsi Ekonomi Bergandengan dengan Demokrasi Politik

Kemajuan ekonomi, untuk dapat berkesinambungan, harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi untk kemajuan diri termasuk untuk menggunakan hak-hak politiknya. Prakarsa itu hanya tumbuh apabila ada kesempatan yang penuh dan adil dalam proses pembangunan. Untuk itu harus tercipta kondisi sedemikian

rupa sehingga ada kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri setiap individu dan masyarakatnya. Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam bidang tertentu saja, melainkan semua bidang lapisan ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Singkatnya, kemajuan ekonomi tidak akan mampu bertahan, tanpa demokrasi politik.

Sebagai konsekuensi dari ekonomi dan politik maka pemerintah yang mengembangkan ekknomi rakyat tidak lain adalah pemerintah yang dalam kebijakannya tidak mengabaikan salah satunya, melainkan sama-sama menumbuh kembangkan kemajuan ekonomi dan politik secara bersama-sama. Pengalaman Orde Lama yang mengutamakan pembangunan politik telah gagal, demikian pula dengan pengalaman selama Pemerintahan Orde Baru juga dianggap gagal karena terlalu memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dirasakan sungguh tepat di era reformasi, jika pemerintah Indonesia mau menumbuh kembangkan demokrasi ekonomi bergandengan dengan demokrasi politik.

2. Pembangunan Ekonomi Berakar Kerakyatan

Sebagai akibat penerapan secara bulat konsep ekonomi liberal kapitalis, tanpa menyesuaikan dengan peradaban sosial budaya di Indonesia, kemajuan–kemajuan ekonomi Indonesia dianggap gagal, karena hanya menguntungkan individu dan kelompok sebagian kecil masyarakat, dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Pada satu sisi meskipun pendapatan dan konsumsi masyarakat makin

meningkat, namun disisi yang lain kelompok masyarakat yang sudah baik keadaanya dan lebih mampu, lebih dapat memanfaatkan dan bahkan diberi kesempatan, sehingga akan memperoleh semua atau sebagian besar hasil pembangunan. Dengan demikian yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin bahkan dapat menjadi lebih miskin.

UUD '45 telah mengamanatkan bahwa demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat dibidang kehidupan ekonomi. Kalau demokrasi ekonomi dajabarkan maka bermakna, bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan angota-angghota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Kemakmuran yang hendak dicapai haruslah kemakmuran atas dasar keadilan sosial.

Masalahnya bagi pembangunan demokrasi ekonomi kita adalah ketidak seimbangan antara kemampuan dan kesempatan berusaha. Karena itu pembangunan ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan harus dapat meningkatkan kemampuan rakyat, selain menciptakan aturan main yang transparan dan tentunya membuat kebijakan dengan seadil-adilnya. Peningkatan kemampuan rakyat tidak lain dengan memberdayakan. Strategi yang perlu dikembangkan adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga membangun pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, misalnya : kerja keras, keterbukaan, hemat, bertanggung jawab.

Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Pembangunan ekonomi yang berakar kerakyatan tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas dn peningkatan sumber daya manusia. Selain itu perlu mempercepat berbagai proses perubahan dari ekonomi tradisonal ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi sub sistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian dan pemberdayaan. Dalam hal ini sasaran ekonomi rakyat tidak lain adalah petani. Selanjutnya dalam kebijakan ini petani harus diberikan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sebagai lahan pertanian, selain itu diberikan pula sumber permodalan yang memadai dan tekhnologi tepat guna dalam berusaha.

Perubahan mendasar pada fungsi koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat adalah dengan telah dikeluarkan UU No. 25 tahun 1992, bahwa koperasi tidak lagi organisasi ekonomi bertujuan sosial tetapi organisasi bertujuan mencari untung untuk kesejahteraan anggota dan msyarakat luas. Dalam pengembangan ekonomi rakyat yang dimaksud, struktur koperasi yang selama ini kurang efektif perlu dilakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Manajemen yang bagus, struktur modal yang kuat sampai pada peningkatan sumber daya manusia keanggotaannya.

Dalam strategi pemberdayaan koperasi, posisi, peran dan fungsi pemerintah pada dasarnya haruslah mendorong peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat melalui koperasi; meningkatkan kegairahan, kesadaran dan kemampuan

berkoperasi diseluruh lapisan masyarakat; peningkatan kemitraan antar koperasi, antar koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara; dan menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuhnya koperasi secara sehat dan mandiri.

3. Pemberdayaan Koperasi

Perubahan mendasar pada fungsi Koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat adalah UU No. 5 tahun 1992, bahwa koperasi tidak lagi organisasi ekonomi bertujuan sosial tetapi organisasi ekonomi bertujuan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

Dalam pengembangan ekonomi rakyat yang dimaksud, struktur koperasi yang selama ini kurang efektif perlu dilakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Manajemen yang bagus, struktur modal yang kuat sampai pada peningkatan sumber daya manusia keanggotaannya.

Dalam strategi pemberdayaan koperasi, posisi, peran dan fungsi pemerintah pada dasarnya haruslah mendorong peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat melalui koperasi; meningkatkan kegairahan, kesadaran dan kemampuan berkoperasi diseluruh lpisan masyarakat; peningkatan kemitraan antar koperasi, antar kopersi dengan usaha swasta dan usaha negara; dan menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuhnya koperasi secara sehat dan mandiri.

4. Kemitraan Usaha

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia dirasakan adanya kepincangan strukturl, antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah. Kesenjangan itu merupakan akibat dari tidak meratanya pemilikan sumber

daya produksi dan produktivitas, serta sistem distribusi dan pasarnya, diantara pelaku ekonomi. Untuk memecahkan masalah ini menuntut perlunya dilakukan kemitraan dan bukan ketergantungan.

Kemitraan terutama dalam dunia usaha, adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Setiap usaha tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Didalam kelebihan dan kelemahan ini timbul keperluan kerjasama dan kemitraan. Justru disinilah arti penting ekonomi rakyat. Usaha yang besar dan usaha yang kecil saling membutuhkan dalam rangka mencapai efisiensi dalam persaingan global.

Di dalam sistem perekonomian tidak ada persaingan bebas yang tidak seimbang. Yang ada adalah persaingan sehat berupa perlombaan untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Usaha yang satu harus bisa menunjang yang lain, dan merupakan bagian dari yang lain. Yang besar menopang dan menolong yang kecil agar tumbuh besar, dan yang kecil membantu yang besar. Serluruhnya menjdi usaha bersma untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada perusahan yang maju dan mejadi besar sendiri meninggalkan usaha-usaha lain yang kecil. Semua berhubungan, terkait dan interdependensi. Sebaiknya dalam praktek perlu pangaturan bahwa petani yang menghasilkan bahan baku tetap memberi akses kepada pabrik demikian pula sebaliknya pabrik memberi akses kepada petani secara timbal balik dalam menghasilkan barang-barang produksi untuk dipasarkan

pada pasar lokal dan internasional. Jika dengan demikian pola yang terjadi bukan yang besar menguasai yang lemah, melainkan kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan demikian diharapkan pula kemitraan dapat menghapus atau mengurangi kegiatan monopoli dan oligopoli.

Selanjutnya dalam kemitraan perlu dikembangkan, selain saling menguntungkan, juga harus adil dan dinamis. Adil, dalam arti kemitraannya tidak memberatkan kepada salah satu pihak. Dinamis, dalam arti tidak terpaku pada suatu keadaan, tetapi senantiasa berkembang, sehingga efektivitas, produktivitas, dan kualitas usaha kemitraan senantiasa berkembang pula. Karena konsep kemitraan ini belum memasyarakat, dirasakan perlu peran pemerintah dalam upaya mempercepat proses sosialisasi. Peran pemerintah disini adalah mendidik, menunjukkan, mempertemukan, memberi teladan dan pengaturan berbagai perundang-undangan tentang kemitraan usaha dalam perekonomian.

5. Anti Monopoli, Oligopoli & Kartel

Dalam mengembangkan ekonomi rakyat, tidak dibenarkan adanya praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi dan keadilan. Ini dapat dimengerti karena kegiatan monopoli tidak efisien, mereka secara sengaja membatasi keluaran dan membebankan harga yang lebih tinggi dibndingkan kalau keluaran atau produksi itu dihasilkan dalam kondisi persaingan yang murni atau sempurna. Oleh karena itu para ekonom menyimpulkan bahwa monopoli atau sejenisnya seperti perusahaan-perusahaan BUMN adalah tidak efisien dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang

murni bersaing karena BUMN menghasilkan terlalu sedikit dengan beban biaya yang terlalu besar. Berkurangnya persaingan atau kompetisi yang didukung oleh adanya subsidi pemerintah, telah menyebabkan perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau negara dituduh sebagai perusahaan yang dijalankan dengan manajemen yang kurang baik, tidak efisien dan dicemari oleh ekses-ekses birokratis, korupsi, kolusi dn nepotisme yang merajalela. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan negara yang seperti itu harus diswastakan (privatisasi) dan dipaksa untuk bersaing dipasaran yang bebas.

Demikian pula halnya dengan kartel, tidak dibenarkan ada dan berkembang dalam sistem perekonomian rakkyat. Karena kartel hanya menciptakan kelompok-kelompok usaha yang kecenderungannya dikuasai oleh sekelompok masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat yang lainnya tidak dapat berkesempatan untuk berusaha. Untuk mencegah dan menberantas praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel ini, pemerintah dan DPR harus membuat pangaturan dalam bentuk perundang-undangan.

6. Dimensi-Dimensi Penting Dalam Ekonomi Rakyat

Selain dari lima variabel yang dikembangkan sebagaimana disebutkan diatas, ada beberapa dimensi penting yang harus dikembangkan dalam ekonomi rakyat antara lain :

1. Dimensi Sumber Daya Manusia

   Sebagaimana diketahui ada dua kelompok pelaku dalam pembangunan yaitu pemerintah dan masyarakat (rakyat). Kedua pelaku pembangunan ini

adalah sama-sama penting dan memberikan akses bagi pembangunan. Kedua pelaku pembangunan ini sama-sama perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Walaupun dari pihak pemerintah sudah cukup memadai kemampuan daya pikir dan nalarnya dalam beraktivitas, namun di pihak masyarakat masih jauh kekurangan dari segi sumber daya manusianya. Oleh karena itu dalam pengembangan ekonomi rakyat, khusus para petani kita perlu diberikan pendidikan dan pleatihan guna peningkatan efisiensi dalam berusaha. Selain itu juga instansi yang terkait menyangkut masalah kegiatan pertanian harus pula rutin dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada petani.

2. Dimensi Lahan Pertanian

Dalam pengembangan ekonomi rakyat, Faktor pemilikan lahan oleh petani sangat penting. Dan justru pengaturan pembagian tanah sampai saat ini dirasakan oleh petani kita belum adil. Disatu sisi sebgaian orang begitu banyak menguasai tanah-tanah yang tidak produktif, sementara petani kita yang ingin melakukan kegiatan usaha pertanian tidak mempunyai cukup lahan, sebagai akibat tidak mampu untuk membelinya. Dari segi lahan pertanian, pemerintah melalui Departemen Agraria harus benar-benar melakukan pemetaan, pembagian dan penggunaan lahan pertanian, sehingga lahan-lahan yang tidak produktif dapat diserahkan kepada masyarakat yang tidak memiliki atau lahannya sangat sempit.

3. Dimensi Permodalan

   Selain lahan, petani kita perlu pula memiliki modal dalam arti uang untuk investasi dan modal kerja. Tanpa uang petani kita jelas tidak akan mungkin memiliki peralatan, bibit tanaman, pupuk, racun hama dan biaya hidup selama kegiatan produksi. Untuk itu pemerintah harus mencari jalan keluar masalah kesulitan pemilikan lahan dan permodalan ini dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Sedangkan modal (uang) untuk kegiatan berusaha, pemerintah dapat menerapkan kebijakan kredit lunak melalui BRI dan Koperasi. Kemudian alokasi dana kredit harus lebih besar diberikan untuk usaha kecil dan menengah bila dibandingkan dengan usaha yang besar.

4. Dimensi Teknologi

   Dewasa ini kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak modal, pengetahuan khusus dan teknologi. Dengan penggunaan teknologi, misalnya bibit unggul, pupuk dan peralatan mekanik, kegiatan pertanian diharapkan lebih efisien hasilnya. Dalam pengembangan ekonomi rakyat, petani secara menyeluruh harus dapat menikmati penggunaan bibit unggul, pupuk, racun hama, dan peralatan mekanik yang mudah didapat dan dengan harga yang terjangkau oleh petani. Dan sesuatu yang masih dirasakan oleh petani adalah penggunaan peralatan mekanik untuk kegiatan pengolahan lahan ataupun

untuk kegiatan panen. Karena itu pengembangan dan penemun baru dibidang teknologi pertanian harus tetap selalu ditingkatkan, dalam rangka efisiensi kegiatan pertanian.

5. Dimensi Distribusi dan Pemasaran

   Sudah barang tentu setelah kegiatan produksi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Dalam pengembangan ekonomi rakyat distribusi dan pemasaran hasil produksi harus tertata sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa setiap hasil pertanian tetap terjual dipasaran lokal, regional dan internasional. Untuk itu pemerintah harus menciptakan pengaturan untuk pemasaran lokal diserahkan kepada koperasi dan pemasaran regional dan internasional harus ada koordinasi antara instansi terkait Departemen Koperasi, Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Lembaga Gugus Kendali Mutu termasuk pula lembaga ekspor.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Beberapa ciri pengem+bangan ekonomi rakyat yaitu pembangunan demokrasi ekonomi yang bergandengan dengan demokrasi politik; pembangunan ekonomi yang berakar kerakyatan;

pemberdayaan koperasi; kemitraan usaha; dan sistem ekonomi yang anti monopoli, oligopoli dan krtel.

2. Ada beberapa dimensi penting dalam pembangunan ekonomi rakyat yaitu dimensi sumber daya manusia; dimensi lahan pertanin; dimensi permodalan; dimensi teknologi; dimensi distribusi dan pemasaran.

2. Saran

Sebagai saran penulis dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah sebagai berikut :

1. Perlu upaya yang nyata dri pemerintah untuk mengembangkan ekonomi rakyat lewat berbagai kebijaksanaan melalui perundng-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Selain itu pelaksanaan dari kebijakan pemerintah harus lebih terpadu dengn meningkatkan semua unsur yang terkait, baik lembaga pemerintah, pengusaha besar, menengah, kecil dan koperasi.

D. Daftar Kepustakaan

Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan.* Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga.* Gramedia, Jakarta.

Collier, William L. Dkk. 1996. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan.* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Clements, Kevin P. 1997, *Teori Pembangunan Dari Kiri ke Kanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Effendi, Sofian, Dkk. 1993. *Membangun Martabat Manusia.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat.* CIDES, Jakarta.

Mubyarto, Dkk. 197. *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia.* Aditya Media, Yogyakarta.

Rais, Muhammad A. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia.* Aditya Media, Yogyakarta.

Siagian, H. 1989. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa.* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sufian, Dkk. 1997. *Manajemen Pembangunan Perdesaan.* Universitas Islam Riau Press, Pekanbaru.

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia.* LP3ES, Jakarta.

Todaro, Michael P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang.* Bumi Aksara, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat.* Rineka Cipta. Jakarta.

Pamungkas, Sri Bintang. 1996. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan.* Yayasan Daulat Rakyat. Jakarta.










Segenap Civitas PPM SWTSI
Teluk Sungka
Turut berduka cita atas wafatnya



Dr. H. Indra Muchlis Adnan

Pembina Yayasan Syech Walid Thaib Saleh Indragiri

Semoga Husnul Khotimah



LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI

Nahdlatul Ulama


UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
جامعة إيندراكيري الإسلامية
UNISI
ILMU KARYA ABDI


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU



Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D. Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan. Di samping itu, penulis juga mengajar di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Beberapa aktivitas organisasi yang telah digeluti, antara lain: Sekretaris dan Ketua DPD KNPI RIAU, Pengurus DPP KNPI, Pengurus DPP AMPI dan Ketua Umum AMPI RIAU, Pengurus DPD Partai Golkar Riau, Ketua Umum DPD Partai Golkar RIAU, Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi Riau, Ketua Umum BPD GAPENSI Riau, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Riau, Ketua KADINDA Riau, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau dan Ketua APKASI/BKKKS, serta Pengda PSSI RIAU.

Dalam bidang Politik, penulis pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003 dan pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir selama dua (2) periode berturut-turut, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013. Setelah purna tugas dari jabatan sebagai bupati, saat ini penulis mengabdikan diri dan *concern* terhadap pengembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis yakin, melalui pendidikan tinggi dan berkualitas akan mengantarkan generasi bangsa menuju kesuksesan yang gemilang.



Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si. Lahir di Pulau Cawan, Mandah, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 12 Februari 1967. Gelar Sarjana Hukum Ketatanegaraan (S-1) Tahun 1985-1989 diraihnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru, Magister Administrasi Publik (S-2) Tahun 1992-1994 dan Doktor Ilmu Administrasi (S-3) Tahun 1997-2001 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Hingga saat ini bekerja sebagai Dosen tetap dan Guru Besar FISIP Universitas Islam Riau, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana UNRI, dan Dosen Pascasarjana Universitas Surapati Jakarta. Jabatan yang di emban saat ini sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UIR dan Direktur Pascasarjana Kerjasama UIR-UNPAD.

Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis merupakan ketua dan peneliti pada Pusat Penelitian Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (P2OD & PM) Universitas Islam Riau, Anggota Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Gubernur Riau (TPK2 GUBRI) Tahun 2003-2008, Staf Ahli Konsultan The Institute for Decentralization and Development Studies (InDDeS), Staf Ahli Peneliti pada Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), anggota Advocat dan Konsultan Hukum (AAI). Penulis aktif menulis di berbagai media cetak dan elektronik.



Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 081 903 717 727/ 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com

